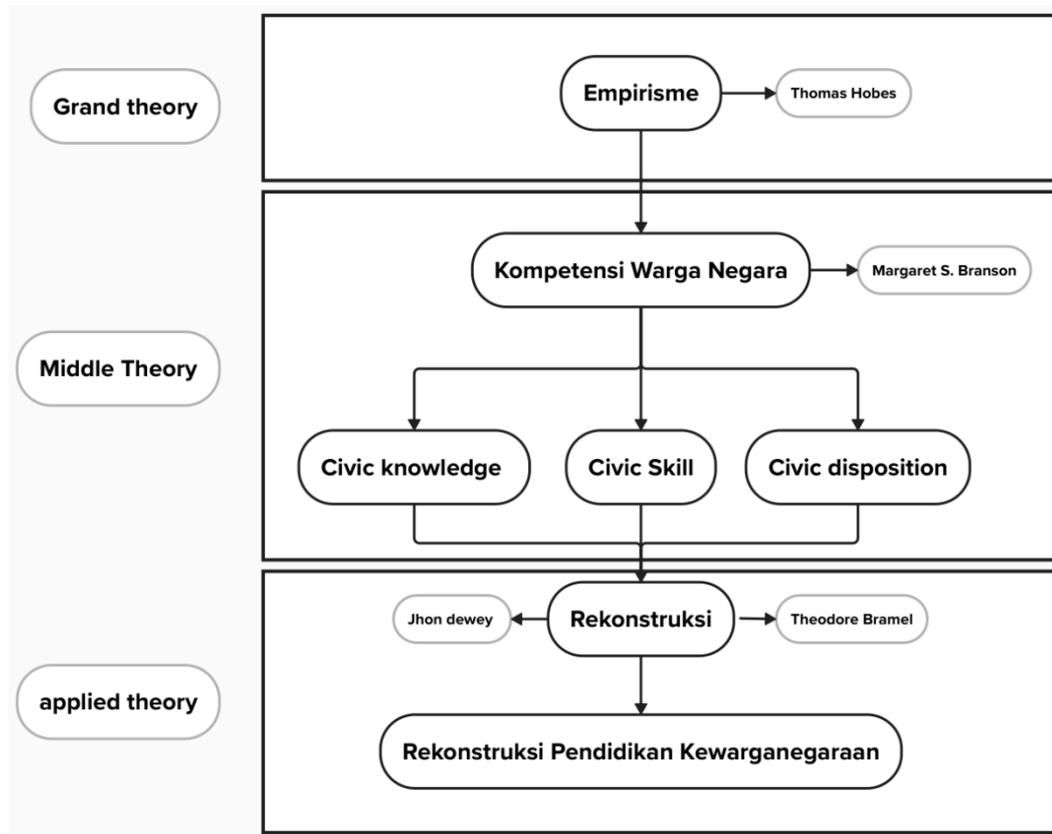


BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori Penelitian

Kerangka teori dalam penelitian ini berfokus pada rekonstruksi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat identitas nasional perspektif global. Penelitian ini menggunakan pendekatan tiga tingkatan teori: *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*, yang saling mendukung untuk memberikan dasar konseptual yang kuat. Kerangka teori tersebut dapat tergambar dalam bagan berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2025)

Grand theory dalam penelitian ini adalah Empirisme, yang didasarkan pada pandangan filosofis Thomas Hobbes. Empirisme menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, empirisme menjadi landasan filosofis yang menunjukkan

pentingnya pengalaman langsung dan pembelajaran berbasis praktik untuk membangun identitas nasional yang kuat di tengah dinamika global.

Pada tingkatan *middle theory*, penelitian ini berangkat dari konsep Kompetensi Warga Negara yang dikembangkan oleh Margaret S. Branson. Kompetensi warga negara mencakup tiga komponen utama: *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. *Civic knowledge* merujuk pada pemahaman tentang sistem politik, hukum, sosial, dan budaya yang relevan untuk memperkuat identitas nasional. *Civic skill* melibatkan kemampuan praktis untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial, seperti berdiskusi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan secara bijak. Sementara itu, *civic disposition* mencerminkan sikap yang mendukung pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti toleransi, tanggung jawab, dan rasa cinta terhadap negara. Ketiga elemen ini menjadi komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat kesadaran dan identitas nasional, sekaligus mempersiapkan individu menghadapi tantangan global.

Pada tingkatan *applied theory*, penelitian ini diarahkan pada rekonstruksi pendidikan kewarganegaraan yang didasarkan pada teori rekonstruksionisme dari John Dewey dan Theodore Brameld. John Dewey menekankan pentingnya pendidikan berbasis pengalaman sebagai alat untuk membangun keterlibatan aktif individu dalam pembelajaran, yang sangat relevan dalam upaya memperkuat identitas nasional. Di sisi lain, Theodore Brameld menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk merekonstruksi masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya global. Dalam konteks ini, rekonstruksi pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme dengan perspektif global, sehingga mahasiswa/generasi muda tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga mampu berperan aktif dalam membangun identitas nasional yang kokoh di era global.

2.2 Konsep Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Subkhan (2022) Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menanamkan nilai-nilai ke Indonesiaan kepada mahasiswa yang merupakan warga negara muda. Dalam memberikan pemahaman tentang nilai-nilai ke-Indonesiaan

harus ada kesepahaman dan kesepakatan bersama antar semua komponen. Dengan memahami tanggung jawab bersama tersebut muncul kesadaran bahwa mendidik generasi muda tidak bisa sendiri sendiri, tidak bisa parsial. Kebersamaan dalam menyiapkan generasi penerus akan menghindari sikap saling menyalahkan dan saling melempar tanggung jawab.

Konsep kebersamaan merupakan perintah Allah SWT, Firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat As-Shaf ayat 4 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh" (Chasanah: 2008, hlm. 89). Ayat ini mengisyaratkan kepada manusia untuk menghindari sifat egois, mementingkan diri sendiri, saling melempar tanggung jawab. Pada sisi lain ayat ini juga mengajak untuk menjaga persatuan dan mengedepankan kepentingan umat. Mahasiswa sebagai generasi muda adalah investasi masa depan sebuah bangsa, maka sudah selayaknya semua memiliki tanggung jawab bersama dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi generasi muda yang cerdas dan baik. Memberikan Pendidikan yang layak merupakan cara efektif dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara cerdas dan baik.

Dimensi definisi pendidikan sangat bervariasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Wharton (1983, hlm. 21), bahwa setiap pendidik yang berkecimpung dalam dunia pendidikan harus memiliki sebuah ide yang cukup dalam memajukan Pendidikan. Selanjutnya menurut Butts (1968, hlm. 11) menyatakan bahwa belum ada definisi pendidikan yang pasti, Pendidikan sering kali memiliki makna yang beragam, karena banyak ahli yang berbeda memberi definisi yang berbeda pula. Namun menurut Bailey (2005, hlm. 16) mengatakan walaupun memiliki perbedaan definisi mengenai pendidikan, akan tetapi semuanya akan setuju jika, pendidikan dijadikan perhatian bersama dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Ahli pendidikan Dewey (1963, hlm.89-90) berpendapat bahwa:

Agar Pendidikan penuh makna, maka rekonstruksi dan reorganisasi Pendidikan menjadi hal yang sangat fundamental dalam memberikan pengalaman pengalaman pada tahapan Pendidikan selanjutnya. Upaya pendalaman pengalaman sejatinya bukan saja menjadi landasan ke arah tahapan pendidikan selanjutnya, akan tetapi juga sebagai kontrol dan penentuan arah tujuan Pendidikan. Pengalaman yang diberikan selama Pendidikan mendorong adanya interaksi aktif individu sebagai peserta Pendidikan dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut Brubacher (1978, hlm. 371) dengan potensi Pendidikan yang dimilikinya, setiap individu akan mampu menolong dirinya, menolong orang lain, melalui kebiasaan kebiasaan yang positif dan juga sebagai perwujudan tujuan Pendidikan. Pendidikan harus mampu mengembangkan beberapa aspek, sebagaimana dipaparkan oleh Good (1985, hlm. 145) yakni:

Pendidikan merupakan pengembangan dari dua aspek, yakni aspek individu dan aspek sosial. Pada aspek individu, Pendidikan sejatinya merupakan proses pengembangan potensi dirinya dengan kemampuan dan sikap positif, untuk selanjutnya mendorong perilaku perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Aspek selanjutnya adalah aspek sosial, tahapan aspek sosial mendorong individu memiliki kontrol dan filter terhadap pengaruh pengaruh didalam masyarakat sehingga ia dapat berkiprah secara optimal sebagai individu dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan sejatinya suatu proses yang berkesinambungan dalam memperbaiki kekurangan dan kelemahan manusia yang secara kodrat manusianya memiliki kekurangan dan kelemahan. Proses transformasi pengetahuan dilakukan oleh individu yang telah dewasa kepada individu yang belum siap secara jasmani maupun rohani untuk terjun dalam masyarakat. Proses Pendidikan meliputi pengembangan pada aspek fisik, aspek afektif dengan pengembangan nilai nilai moralitas, juga proses pengembangan intelektual yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Adams dan McGovern (1993, hlm. 267) perlunya adanya komitmen pendidikan terhadap *civics*, tanggung jawab sosial dalam masyarakat global. Hovland (2005, hlm. 390) terkait institusi pendidikan ataupun Perguruan Tinggi harus membangun program secara global dengan mengkaji misi lembaga, untuk merancang strategi Pendidikan Kewarganegaraan Pemikiran senada disampaikan oleh Sperandio (2010, hlm. 22)

Muhamad Subkhan, 2025

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL PERSPEKTIF GLOBAL (STUDI DESKRIPTIF DI UPI, UNJ, dan UNNES)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang menyatakan bahwa, Pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan dan berwawasan global, akan dapat mengembangkan sikap sebagai warga negara global yang mempunyai wawasan yang jelas terhadap syarat kewarganegaraan dalam masyarakat global.

Kewarganegaraan sejatinya adalah pembahasan tentang suatu analisa dan teoritis merupakan alat untuk mengatasi ketidakadilan dengan kedalaman dan kepekaan berpikir, dengan ruang lingkup dan komitmen yang harus tepat dan tuntas. Terhadap dinamika tersebut, bagaimana peran pemerintah? Dalam hal ini Isin (2002, hlm. 16) menyatakan bahwa:

Pendidikan kewarganegaraan merupakan interdisipliner keilmuan yang secara tegas memunculkan kebijakan-kebijakan yang diantaranya membahas tentang, kesejahteraan, pendidikan, tenaga kerja, hubungan internasional dan migrasi. Pembahasan-pembahasan tentang hal di atas sejatinya merupakan hal yang sangat fundamental terkait dengan kewarganegaraan, yang harus mampu diwujudkan dalam bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah harus mampu mengakomodasi dan mewujudkan hal mendasar warga Negara tersebut.

Melalui kewarganegaraan akan mendorong negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan warga negara.

Dengan demikian menurut Bendix (1964, hlm. 301) dalam tugas membangun kembali masyarakat sipil (atau ruang publik) tidak dapat dicapai tanpa bentuk kewarganegaraan yang dinamis dan ikatan yang kuat antara Negara dan warga negaranya. Mann (1987, hlm. 271) Kewarganegaraan bukan merupakan strategi eksklusif untuk 'kelas penguasa'. Akan tetapi menurut MacIntyre (1981, hlm. 176) dengan pendidikan kewarganegaraan, Negara harus mampu menghadirkan regulasi yang berkaitan dengan Politik sebagai dasar, wacana, dan gagasan. Selain itu menurut Nussbaum (2001, hlm. 147) adalah untuk menghadirkan kebijakan/kesejahteraan warga Negara.

Menurut Janoski (1998, hlm. 341) dan Bottomore (1993, hlm. 98) Kewarganegaraan juga dapat didefinisikan sebagai peran pasif maupun aktif individu dalam masyarakat bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan hak universalis dan kewajiban pada tingkat kesetaraan tertentu. Selanjutnya menurut Thompson (1970, hlm. 210) Kewarganegaraan melibatkan aktif individunya atau warga negaranya akan dapat mempengaruhi kehidupan politik

dalam pemerintahan, atau Negara dalam mengeluarkan regulasinya di bawah sistem hukum yang diterapkan. Berkaitan dengan Prosedur hak dan kewajiban sebagai warga Negara, Jones dan Wallace (1992, hlm. 18-23) mengatakan bahwa hal ini dapat diasumsikan dan dapat diwujudkan melalui kesadaran sebagai anggota kewarganegaraan secara bertahap dimulai sejak menjadi warga muda, dan diwujudkan dalam kehidupan keluarga dan selanjutnya dalam kehidupan bernegara.

Bagaimana literasi Pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan? Dewi dan Budimansyah (2020, hlm. 12) mengatakan bahwa Literasi kewarganegaraan akan mendorong pembentukan warga muda berpikir positif dan memahami fungsinya untuk melakukan perubahan secara damai, perubahan secara damai akan menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat”.

Berdasarkan teori teori diatas yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan yakni, Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses berkelanjutan, yang ditujukan kepada warga muda, tujuan proses ini adalah menumbuhkan dan meningkatkan potensi fisik, kecerdasan intelektual, dan moral, sebagai proses mendorong kesadaran tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga warga muda dapat berperan aktif secara sosial politik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Dalam Pendidikan perlu adanya rujukan atau dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran atau Pendidikan, dan rujukan itu adalah filosofi Pendidikan. Filsafat Pendidikan dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum, evaluasi pembelajaran. Dalam dunia Pendidikan dikenal berbagai filsafat Pendidikan, diantaranya adalah filsafat filsafat progresivisme, filsafat perenialisme, filsafat essensialisme, dan filsafat rekonstruksionisme. Setiap filsafat Pendidikan memiliki keunggulan dan kelemahan masing masing, dalam penyusunan disertasi ini didasarkan pada filsafat rekonstruksionisme.

Konsep rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud dalam tersebut merujuk pada upaya memperbaharui dan menyusun kembali pendekatan pendidikan agar lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik, khususnya dalam membangun kesadaran kewarganegaraan di kalangan generasi muda. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran John Dewey tentang rekonstruksi dan reorganisasi

pendidikan, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam, baik secara intelektual maupun praktis, kepada siswa. Pengalaman ini tidak hanya mengajarkan teori kewarganegaraan, tetapi juga mendorong interaksi aktif siswa dengan lingkungan sosial dan politik mereka.

Rekonstruksi ini juga mengedepankan pentingnya kebersamaan dalam pendidikan kewarganegaraan, yang tidak bisa dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah, melainkan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Hal ini untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mendidik generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam mempersiapkan generasi muda agar memiliki kesadaran sosial yang tinggi, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan kebangsaan. Selain itu, rekonstruksi ini juga harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial dalam setiap tahap pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat As-Shaf ayat 4, yang mengajarkan pentingnya kebersamaan dan persatuan, pendidikan kewarganegaraan harus membentuk individu yang tidak hanya sadar akan hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Rekonstruksi pendidikan ini juga perlu memperhatikan perkembangan dunia yang semakin global, sehingga pendidikan kewarganegaraan tidak hanya fokus pada pemahaman nasional, tetapi juga mengembangkan sikap kewarganegaraan global yang lebih luas.

Dengan demikian, rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya tentang memperbaiki metode pengajaran atau kurikulum, tetapi juga tentang membangun fondasi yang lebih kuat dalam membentuk karakter warga negara yang baik, yang memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawab sosialnya, baik dalam skala nasional maupun global. Ini adalah proses yang berkelanjutan, yang berupaya menciptakan generasi muda yang siap untuk menghadapi tantangan zaman dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewarganegaraan dan peran mereka dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

2.2.1 Sejarah Rekonstrusionisme

Menurut Sanjaya (2013, hlm. 236) Proses belajar pada hakikatnya adalah kegiatan mental yang tidak tampak. Artinya, proses perubahan yang terjadi dalam

diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat disaksikan dengan jelas. Manusia hanya mungkin dapat menyaksikan dari gejala-gejala perubahan perilaku yang tampak. Misalnya ketika seorang guru menerangkan pelajaran, walaupun seorang siswa sepertinya memperhatikan sambil mengangguk-anggukkan kepala, maka belum tentu yang bersangkutan belajar. Mungkin mengangguk-anggukkan kepala itu bukan karena ia memperhatikan materi pelajaran dan paham apa yang dikatakan guru. Bisa jadi dia mengagumi cara guru berbicara, mengagumi penampilan guru, dan sebagainya. Siswa yang demikian pada hakikatnya tidak belajar. Sebaliknya ketika seorang siswa tampak mengantuk, menunduk, belum tentu ia tidak sedang belajar. Bisa jadi otak dan pikirannya sedang mencerna keterangan guru.

Selanjutnya Sanjaya (2013, hlm. 237) Teori belajar *behavioristik* adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku (*behavior*) yang dapat diamati. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons (S-R). Oleh karena itu teori ini juga dinamakan teori stimulus-respons. Belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya.

Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam kegiatan belajar. Ini bisa dimaklumi karena behaviorisme berkembang melalui suatu penelitian yang melibatkan binatang seperti anjing, burung merpati, tikus, dan kucing sebagai objek. Peristiwa belajar semata-mata dilakukan dengan melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Suyono dan Hariyanto (2011, hlm. 59) berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus (S) dengan respons (R). Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah adanya *input* berupa stimulus dan *output* yang berupa respon.

Belajar menurut psikologi behavioristik menurut Siregar dan Nara (2010, hlm. 25) adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan

lingkungan. Teori belajar tingkah laku atau behavioristik didirikan dan dianut oleh beberapa ilmuwan. Diantaranya adalah Ivan Pavlov. Berikut adalah sekilas riwayat hidup dan teori yang dikembangkan oleh Pavlov.

Pada tahun 1927, Pavlov mengadakan percobaan pada anjing. Anjing akan mengeluarkan air liur jika melihat atau mencium bau makanan. Terlebih dahulu Pavlov membunyikan bel sebelum anjing diberi makanan. Pada percobaan berikutnya begitu mendengar bel, otomatis air liur anjing akan keluar walau belum melihat makanan (Santrock, 2018, hlm. 167). Artinya, perilaku individu dapat dikondisikan. Belajar merupakan upaya untuk mengkondisikan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu.

Menurut Sanjaya (2013, hlm. 240) Makanan yang diberikan kepada anjing disebut perangsang tak bersyarat (*unconditioned stimulus*), sementara bel disebut perangsang bersyarat (*conditioned stimulus*). Baik terhadap perangsang bersyarat maupun tak bersyarat, anjing memberikan respon berupa keluarnya air liur (*unconditioned response*). Dari eksperimen ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan berulang-ulang dengan pengkondisian tertentu. Pengkondisian itu adalah dengan melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan tingkah laku tersebut. Karena itu teori Pavlov dikenal dengan *responded conditioning* atau teori *classical conditioning*. Menurut Pavlov (dalam Andriyani, 2015, hlm. 27) pengkondisian yang dilakukan pada anjing tersebut dapat juga berlaku pada manusia.

Sudut pandang etimologis dari rekonstruksi adalah menata kembali, atau menyusun kembali, atau membangun kembali. Arti menata kembali tentu obyek yang akan ditata atau disusun sudah ada, dan obyek tersebut harus dibangun kembali dalam menggapai tujuan yang diinginkan. Adapun obyek dalam kajian ini adalah Pendidikan kewarganegaraan, sehingga dapat diartikan dalam menggapai tujuan Pendidikan kewarganegaraan agar berjalan dengan dinamis dan mencapai sasaran harus dibangun, harus ditata dan harus disusun kembali.

Dasar dari Filosofi rekonstruksionisme yakni pemikiran pemikiran atau ide-ide utopis dan sosialistik. Perkembangan filsafat rekonstruksionisme berangkat dari depresi di fase akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20-an. Momentum ini memberikan peluang bagi ideologi ideologi untuk berkembang. Pada masa itu

perkembangan Pendidikan progresivisme mencapai puncak perkembangan dan popularitasnya. Di Amerika Serikat Sebagian masyarakat mulai merasakan situasi yang statis/stagnan dalam pelaksanaan Pendidikan. Muncul keresahan pemikiran bahwa Pendidikan hanya untuk kelas menengah ke atas dan sifatnya privat (Arends, 2014, hlm. 478). Menurut Dewey (1920, hlm. 348), Ornstein (2018, hlm. 267), Watson & Coso (2013 hlm. 127) mengemukakan bahwa:

“Padahal konsep pelayanan Pendidikan yang menitikberatkan pada kelompok sosial tertentu tersebut harus dirubah/direformasi, sehingga Pendidikan harus berpusat kepada masyarakat, perhatian Pendidikan harus mencakup semua kelas sosial dalam Masyarakat”.

Seorang tokoh Pendidikan bernama George Counts melontarkan kritikan keras atas situasi dan kondisi yang berkembang, kritikan Counts disampaikan pada pertemuan rutin asosiasi Pendidikan progresif yang dilaksanakan pada tahun 1932. Kritikan Counts kepada peserta pertemuan adalah, apakah tokoh tokoh Pendidikan progresif berani merubah, mereformasi kondisi sehingga Pendidikan menjadi milik seluruh masyarakat, milik seluruh kelas sosial dalam masyarakat. Menurut Ornstein (2018, hlm. 56) mengemukakan bahwa Seorang pendidik/Guru harus mampu menjadi agen perubahan dalam Pendidikan, dan perubahan harus diawali oleh kesepakatan bahwa sekolah dan guru merupakan suatu kesatuan yang terorganisir dan harus mampu mengawali perubahan. Lebih jauh lagi Count katakan bahwa, apabila Pendidikan progresif murni harusnya membuka diri terhadap kondisi real dalam masyarakat, membuka terhadap isu isu yang berkembang, sehingga Pendidikan mampu menghasilkan kemakmuran dalam masyarakat melalui pengembangan teori teori yang lebih komprehensif dan realistis.

McKenan (2018, hlm. 145) mengatakan bahwa teori-teori tidak boleh berpijak pada indoktrinasi akan tetapi realitanya persoalan persoalan Pendidikan pada masa 1920 sampai dengan akhir 1930 terbelenggu pada Pendidikan untuk kelas sosial tertentu dan tidak mempedulikan fakta dan problematika dalam masyarakat yang terkepung oleh diskriminasi, pengangguran, dan kemiskinan. Berangkat dari pemikiran ini maka perlu adanya rekonstruksi.

Ide atau paham Rekontruksi senantiasa berpijak pada tokoh tokoh yang Bernama Jhon dewey dan Theodore Bramel yang disepakati sebagai penggagas teori rekonstruksionisme ini. Bramel menyatakan jika solusi dari stagnasi dan

depresi Pendidikan adalah dengan melakukan rekonstruksi Pendidikan. Pada sisi lain guru dan murid haruslah netral dan berpikir serta bersikap obyektif terhadap dinamika dalam masyarakat, seorang Guru harus berperan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat. Menurut Ornstein (2007) Guru maupun siswa memiliki otoritas akan kebebasannya untuk meningkatkan profesi Pendidikan, melakukan inkuiri ilmiah yang bertujuan untuk memperkuat kontrol sekolah terhadap kemajuan dan dinamika masyarakat.

Sejatinya perubahan sebuah keniscayaan karena kondisi masyarakat pun mengalami perubahan. Wall (2019, hlm. 54) Maka guru sebagai *change agent* harus mendorong perubahan perubahan tersebut dengan jalan menjaga korelasi sosial, ekonomi, politik dan Pendidikan. Rekonstruksi Pendidikan melalui reformasi kurikulum yang harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan berpijak pada idealisme dan isu sosial. Mengapa hal ini harus dilakukan? Karenamenurut Ornstein (2018, hlm. 289) guru yang merupakan suatu profesi yang mulia harus mengembangkan secara profesionalitas demi kemajuan dunia Pendidikan sebagai bagian dari tatanan sosial dalam masyarakat. Pemikiran Michael Apple yang mengamini pemikiran perlunya rekonstruksi Pendidikan, ia katakan bahwa Pendidikan mempunyai peran substansif membangun Masyarakat. Dalam koridor pemikiran lebih luas sejatinya Pendidikan memiliki potensi untuk menciptakan manusia (warga muda) menjadi lebih baik dengan kurikulum yang sosio-humanistik (Mc Kernan, 2013, hlm. 134).

2.2.2 Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan

Rekonstruksi Pendidikan menurut Greene (2002, hlm. 147) diarahkan pada berbagai aspek mulai dari kurikulum, maupun model model pembelajaran. Kurikulum harus ditekankan kepada peningkatan kemampuan komunikasi dengan titik berat pada ekspresi personal, pengetahuan intelektual, dan refleksi kesadaran personal. Adapun menurut Freire (1985, hlm. 36) dalam mewujudkan perubahan tersebut kurikulum hendaknya berfokus pada pengembangan komunitas, tujuan negara dan problematika problematika yang harus interdisipliner.

Bagaimana rekonstruksi pendidikan Kewarganegaraan tersebut? Pemikiran Aanand dan Trisno (2020, hlm. 29):

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ilmu yang multidisipliner, sebagai bagian dari pendidikan maka harus mempersiapkan warga muda untuk 1) dapat berinovasi untuk membuat karya yang belum ada, 2) mempersiapkan warga muda untuk mampu memecahkan persoalan persoalan, dan 3) mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian wujud atau gambaran rekonstruksinya adalah dengan mempersiapkan tenaga pendidik (guru dan dosen) memiliki kompetensi dan keahlian yang tinggi dalam mendukung perubahan.

Sementara Rekontruksi pendidikan kewarganegaraan menurut Udin S. Winataputra (2003, hlm. 109) yakni "tinjauan obyektif kewarganegaraan, rencana kurikulum kewarganegaraan, dan implemetasi sosial budaya kewarganegaraan".

Bagaimana dengan Indonesia? Dasar Pendidikan Indonesia secara sosial politik tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki visi dan misi yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intellegense*). Berpangkal pada kecerdasan warga negara maka akan tumbuh budaya warga negara (*Civic culture*). Lebih Winataputra (2003, hlm. 78) menyatakan bahwa:

“Pemahaman yang luas adanya kecerdasan dan kebudayaan warga negara akan mendukung tumbuhnya demokrasi yang positif, dan demokrasi yang positif akan bermanfaat dalam pembangunan sumber daya manusia sebuah bangsa, dalam hal ini adalah Indonesia”.

Arah kurikulum menurut Winataputra (2008, hlm. 80) yakni:

“Maka kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan harus ditujukan pada pengembangan dan peningkatan kecerdasan warga Negara (*civic inteleggence*), pengembangan dan peningkatan pengetahuan warga negara (*civic knowledge*), pengembangan dan peningkatan sikap warga negara (*civic dispositions*), pengembangan dan peningkatan keterampilan warga negara (*civic skills*), peningkatan dan pengembangan warga negara yang memiliki komitmen (*civic commitment*), peningkatan dan pengembangan keteguhan warga negara (*civic confident*), peningkataan dan pengembangan kompetensi warga negara (*civic competence*), dari semua peningkatan dan pengembangan warga negara tersebut untuk mewujudkan warga negara yang mempunyai adab dan kebajikan (*civic civility/virtue*)”.

Maka evaluasi dalam pengembangan kurikulum Pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan psikososial mencakup pada model model pembelajaran yakni pendekatan paedagogiknya.

Pada sisi lain rekonstruksi pendidikan Kewarganegaraan dalam mempersiapkan warga Negara muda generasi emas Indonesia harus diawali dengan merekonstruksi capaian pembelajaran PPKn. Menurut Soedijarto (2015, hlm. 216)

Muhamad Subkhan, 2025

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL PERSPEKTIF GLOBAL (STUDI DESKRIPTIF DI UPI, UNJ, dan UNNES)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Capaian pembelajaran PKn dalam ranah upaya meningkatkan ketahanan nasional dan pertahanan Negara. Melalui sistem Pendidikan nasional yang jelas arah capaian pembelajarannya, dan efektif penerapannya akan mendukung terbentuknya warga negara yang aktif serta berkontribusi dalam pembelaan negara. Senada dengan pemikiran Winataputra dan Soedijarto, menurut Pasandaran (2015, hlm. 65) perlunya rekonstruksi pendidikan kewarganegaraan dengan mengedepankan konsep rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan. Hal yang tidak boleh terlupakan juga adalah perlunya penguatan prinsip-prinsip pedagogik PKn. Maka untuk mewujudkan hal tersebut upaya pengembangan PKn dalam menyiapkan warga Negara muda, maka perlunya ada kesadaran semua pihak untuk berkomitmen dan bekerja sama.

Pemikiran Budimansyah (2015, hlm. 34) terkait dengan rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa, mereposisi Pendidikan Kewarganegaraan dengan gagasan yakni, *Pertama*, PKn sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun nonformal (luar sekolah), yang berkontribusi sebagai tugas yang mulia dalam mempersiapkan warga negara dengan segala potensinya untuk menjadi warga negara yang memiliki kecerdasan, serta bertanggung sebagai bagian dari komitmennya sebagai warga negara yang baik dan cerdas”.

Gagasan keduanya yakni, dalam rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan yakni mendorong warga negara amampu mengaktualisasikan dirinya dengan berperan aktif beraktifitas secara real baik secara personal maupun kelompok, untuk menjadikan warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya yang implementasinya dapat dipertanggung jawabkan”.

Gagasan reposisi Pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya yakni perlunya gagasan mengenai pendidikan politik dan wawasan nusantara bagi aparatur negara, bagi aktivis organisasi social kemasyarakatan maupun organisasi politik melalui program program *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* untuk menumbuhkembangkan kemampuan berpikir dan menalar (*state of mind*), dan semaksimal mungkin menghindari pencekakan dalam mencerdaskan warga negara”. Rekonstruksi yang selanjutnya adalah perlu adanya inovasi kurikulum, inovasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mempersiapkan

calon tenaga pendidik yang berkualitas. Adapun menurut Sapriya (2015, hlm 12) Dengan inovasi Kurikulum, maka akan menghasilkan kurikulum yang mewujudkan cita cita bangsa, cita Pendidikan nasional yang bersandar pada filosofi bangsa Indonesia.”.

Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut, menurut peneliti Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses berkelanjutan, yang ditujukan kepada warga muda, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, intelektual, dan moral, sebagai proses mendorong kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, sehingga warga negara muda dapat berperan aktif secara sosial politik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu untuk merekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan, rekonstruksi harus dilakukan karena Pendidikan kewarganegaraan merupakan cabang ilmu yang multi disiplin. Rekonstruksi harus betul betul dijalankan dengan baik, didukung oleh semua komponen masyarakat dan regulasi pemerintah yang mendukung tujuan pendidikan nasional.

Rekonstruksi yang pertama adalah harus mengedepankan rekonseptualisasi Pendidikan kewarganegaraan dengan penguatan tiga domain utama Pendidikan Kewarganegaraan yaitu *civic knowledge*, penguatan *civic skills*, penguatan *civic virtue*. Rekontruksi kedua adalah dengan mereposisi Pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler, membentuk Gerakan sosio-kultural kewarganegaraan. Rekonstruksi ketiga adalah dengan melakukan inovasi kurikulum, inovasi kurikulum agar menghasilkan kurikulum yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mampu menjawab tantangan bangsa menjadi bangsa yang beradab. Inovasi kurikulum juga dengan mendesain model model pembelajaran yang inovatif, kreatif.

Bagaimana arah Rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan? Maka Lickona (1991, hlm. 45) menyatakan bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan pada terbentuknya karakter, melalui Pendidikan Kewarganegaraan warga negara dapat dikembangkan nilai nilai moral dan etikanya. Nilai etika dan moral ini menjadi pondasi dalam bermasyarakat dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dala Pendidikan Kewragnegaraan perlu diajarkan tentang, pengembangan nilai nilai dan etika, pembentukan karakter yang bertanggung

jawab, dan pembelajaran berbasis pengalaman dalam menginternalisasi nilai-nilai dalam Pendidikan kewarganegaraan”. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengembangkan pembelajaran yang demokratis dan partisipatif. Adapun pemikiran Dewey (1961, hlm. 87) menyatakan tentang Pendidikan kewarganegaraan agar mahasiswa yang merupakan warga negara muda dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, kontribusi warga negara muda sangat diharapkan agar tercipta Masyarakat yang demokratis.

Berkaitan dengan pencapaian warganegara muda, maka Preire (1970, hlm. 36) berpendapat bahwa, pencapaian warga negara muda yang demokratis dan partisipatif tersebut, mahasiswa harus dikembangkan kesadaran kritisnya (*critical consciousness*) melalui pengembangan kesadaran, Pendidikan yang memberdayakan, dan analisis kritis terhadap isu-isu sosial dan politik. Pendapat senada dipaparkan oleh Giroux (1988, hlm. 127) bahwa pengembangan Pendidikan kewarganegaraan dapat melalui pendidikan praktik politik, dan perlu diberdayakan mahasiswa muda untuk memperjuangkan keadilan sosial dalam Masyarakat.

Dari pendapat beberapa ahli dari luar Indonesia tersebut dapat ditarik Kesimpulan bahwa dalam rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan harus diperhatikan bahwa:

- 1) Perlunya pengembangan nilai-nilai moral dan etika
- 2) Pendekatan yang demokratis dan partisipatif
- 3) Adanya integrasi nilai-nilai budaya lokal
- 4) Pemberdayaan kritis dengan Pendidikan praktik politik
- 5) Perlunya perjuangan untuk mencapai keadilan sosial.

Pendapat mengenai arah pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dari Barat tersebut, Peneliti mencoba untuk mengkombinasikan pemikiran Pendidikan khususnya Pendidikan kewarganegaraan dari pemikir atau ahli Pendidikan di Indonesia. *Pertama* Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa, pentingnya pendidikan yang holistik dan berbasis pada nilai-nilai budaya lokal. Menurutnya, pendidikan kewarganegaraan harus mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia dan memperkuat identitas nasional. Ki Bagus Hadikusumo (1969, hlm. 48) juga menyatakan bahwa pentingnya pendidikan moral dan agama

dalam membentuk karakter warga negara yang baik. Ia percaya bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Tokoh Pembina Pancasila pada era orde baru yakni Selo Soemardjan (2001, hlm. 67) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam konteks global.

Anies Baswedan (2012, hlm. 27) juga menyatakan bahwa, pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman tentang dinamika global. Pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Pendapat ini diperkuat dengan pemikiran Buchori (2007, hlm. 59) bahwa pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Menurutnya, pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kesetaraan.

Berdasarkan Pendapat pendapat ahli Pendidikan Indonesia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, indikator rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan integrasi Pendidikan agama, nilai-nilai moral, etika, lokal.
2. Pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab Penguatan identitas nasional.
3. Pendekatan pendidikan yang holistik dan kontekstual melalui Penguatan kemampuan berpikir kritis dan analitis
4. Pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa dengan Pemahaman tentang dinamika global untuk berkontribusi dalam konteks global, dan mampu beradaptasi sosial terhadap perubahan global
5. Keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis

Dengan demikian berdasarkan literasi para ahli, maka rekonstruksis Pendidikan kewarganegaraan tahapanya adalah:

1. Pertama adalah harus mengedepankan rekonseptualisasi Pendidikan kewarganegaraan dengan penguatan tiga domain utama Pendidikan

Kewarganegaraan yaitu *civic knowledge*, penguatan *civic skills*, penguatan *civic virtue*.

2. Kedua adalah dengan mereposisi Pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler, membentuk Gerakan sosio-kultural kewarganegaraan.
3. Ketiga adalah dengan melakukan inovasi kurikulum, inovasi kurikulum agar menghasilkan kurikulum yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mampu menjawab tantangan bangsa menjadi bangsa yang beradab. Inovasi kurikulum juga dengan mendesain model model pembelajaran yang inovatif, kreatif.

Muatan dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

1. Pengembangan dan integrasi Pendidikan agama, nilai-nilai moral, etika, lokal.
2. Pengembangan dan pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab.
3. Penguatan identitas nasional.
4. Pendekatan pendidikan yang holistik dan kontekstual melalui Penguatan kemampuan berpikir kritis dan analitis
5. Pengembangan Pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa dengan Pemahaman tentang dinamika global,
6. Pengembangan materi untuk berkontribusi dalam konteks global, dan mampu beradaptasi sosial terhadap perubahan global
7. Pengembangan materi dalam mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.
8. Pengembangan dan penguatan Pendidikan praktik politik.
9. Pengembangan dan penguatan materi Hukum, dengan pentingnya perjuangan untuk mencapai keadilan sosial dalam Masyarakat

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa dari masa ke masa. Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di perguruan tinggi mencerminkan transformasi ideologi, kurikulum, dan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Berikut adalah penelusuran perjalanan sejarah PKn di perguruan tinggi dari masa kolonial hingga era kontemporer.

1. Periode Awal Pembentukan: Pada masa kolonial Belanda, institusi pendidikan tinggi mulai didirikan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial. Salah satu yang tertua adalah Sekolah Tinggi Teknik di Buitenzorg, yang kini menjadi Institut Pertanian Bogor, didirikan pada tahun 1920 (Fadlurrahman, 2023, hlm. 7). Pendidikan kewarganegaraan pada masa ini diarahkan untuk melatih birokrat yang loyal kepada pemerintah kolonial. Materi yang diajarkan lebih menekankan pada kepatuhan dan tidak memberi ruang pada pemahaman demokrasi atau hak asasi manusia.
2. Era Orde Lama: Pada masa ini, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenalkan melalui kurikulum sekolah, meskipun istilah “Pendidikan Kewarganegaraan” belum eksplisit digunakan. Kurikulum 1957 menandai langkah awal dengan menyertakan konsep kewarganegaraan dalam mata pelajaran (Rusmin, 2022, hlm. 23). Pada tahun 1959, istilah “Civics” mulai digunakan, yang fokusnya mencakup sejarah kebangkitan nasional, UUD 1945, dan karakter bangsa (Sunarso, 2009, hlm. 176).
3. Era Orde Baru: Pada masa pemerintahan Orde Baru, pendidikan kewarganegaraan menjadi alat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 1967 menetapkan bahwa pelajaran Civics mencakup Pancasila, UUD 1945, dan Ketetapan MPRS (Sulinggih, 2025, hlm. 7). Pada tingkat perguruan tinggi, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan diwajibkan. Tahun 1978 menjadi tonggak penting dengan penerapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai bagian integral dari pembelajaran (Widiatmika, 2022, hlm 45). Namun, beberapa kritik muncul karena materi yang diajarkan dinilai terlalu dogmatis.
4. Era Reformasi: Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan, termasuk dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Pembubaran P4 dan penggantian Pendidikan Kewiraan dengan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi mencerminkan paradigma baru yang lebih demokratis (Prasetyo, 2019, hlm. 11). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan PKn sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada 2004 dan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006 menekankan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi untuk membentuk mahasiswa yang kritis dan partisipatif (Anwar, 2014, hlm. 23).

5. Era Kontemporer: Saat ini, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mengalami rekonstruksi yang signifikan dengan pengenalan Kurikulum Merdeka Belajar 2020. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila yang mencakup enam indikator utama: berpikir kritis, kemandirian, kreativitas, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia (Yunita, dkk., 2023, hlm. 45). Selain itu, konsep kampus merdeka memungkinkan mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, termasuk pembelajaran berbasis proyek dan pengabdian kepada masyarakat (Nanggala & Suryadi, 2020, hlm. 12). Teknologi juga menjadi elemen penting dalam mendukung pembelajaran PKn, sejalan dengan visi Nadiem Makarim untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi digital (Raharjo, 2022, hlm. 27). Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya fokus pada pengetahuan teoritis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kesadaran kritis mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi menunjukkan bagaimana dinamika sosial-politik memengaruhi pendekatan pendidikan di Indonesia. Dari masa kolonial hingga era kontemporer, PKn telah berevolusi dari alat kepatuhan menjadi wahana pembentukan karakter yang kritis, kreatif, dan inklusif. Perjalanan ini mencerminkan komitmen bangsa untuk membangun warga negara yang berdaya dan beradab, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebhinekaan.

2.2.3 Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Kajian merupakan konsep yang merujuk pada perubahan dan interaksi dalam suatu sistem, baik dalam konteks sosial, ekonomi, politik, maupun psikologis. Konsep ini mencerminkan bagaimana suatu sistem dapat berkembang dan beradaptasi dengan berbagai faktor yang memengaruhinya. Tidak hanya perubahan fisik yang dapat diamati, dinamika juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks, sehingga penting untuk memahami konsep ini secara holistik melalui berbagai pendekatan dan literatur ilmiah.

Muhamad Subkhan, 2025

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL
PERSPEKTIF GLOBAL (STUDI DESKRIPTIF DI UPI, UNJ, dan UNNES)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam konteks sosial, kajian sering kali merujuk pada perubahan yang terjadi dalam pola interaksi individu dan kelompok. Penelitian Ramadhan, dkk. (2021, hlm. 145) menyoroti bagaimana dinamika dalam kebijakan di Indonesia terbentuk melalui interaksi antara aktor sosial, ekonomi, dan politik. Proses pengambilan keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan individu, tetapi juga oleh negosiasi yang kompleks di antara berbagai pihak yang terlibat. Studi ini menunjukkan bahwa memahami dinamika sosial menjadi sangat penting untuk merancang kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Kajian juga memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan. Habibi (2025, hlm. 34) menyatakan bahwa kepemimpinan yang mampu memahami dinamika kelompok sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pendidikan. Pemimpin yang responsif terhadap perubahan dapat menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, sehingga mampu meningkatkan hasil pendidikan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika dalam pendidikan bukan hanya tentang perubahan perilaku peserta didik, tetapi juga melibatkan kemampuan manajemen untuk merespons tantangan dan peluang secara tepat.

Dari sudut pandang psikologis, kajian mencakup bagaimana individu merespons tekanan sosial dan perubahan dalam lingkungan mereka. Penelitian Hania dan Afiatin (2021, hlm. 38) mengenai pasangan koruptor menunjukkan bahwa stigma sosial dan tekanan psikologis yang dialami dapat memengaruhi perilaku individu secara signifikan. Studi ini menyoroti bahwa dinamika psikologis tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga memengaruhi hubungan mereka dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Hal ini memperlihatkan pentingnya memahami dinamika psikologis dalam konteks sosial yang kompleks.

Dalam dunia politik, kajian mencerminkan bagaimana struktur kekuasaan dan kesadaran politik masyarakat berubah seiring waktu. Suastika (2020, hlm. 56) mengamati bahwa dinamika politik di Indonesia dipengaruhi oleh pergeseran aliran partai politik dan tingkat partisipasi masyarakat. Perubahan ini sering kali mencerminkan respons terhadap perkembangan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dinamika politik bersifat dinamis dan terus berkembang, sehingga analisis terhadap

faktor-faktor yang memengaruhinya sangat diperlukan untuk memahami arah perubahan politik di masa depan.

Kajian adalah konsep yang kaya dan kompleks, mencakup berbagai aspek interaksi dan perubahan dalam berbagai bidang. Pemahaman terhadap dinamika ini sangat penting untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di berbagai sektor. Kajian ini menegaskan perlunya pendekatan yang menyeluruh untuk memahami dinamika, baik dalam konteks sosial, pendidikan, politik, maupun ekonomi, agar dapat merancang solusi yang relevan dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun karakter dan identitas nasional generasi muda. Dalam konteks ini, dinamika pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter yang baik dan nilai-nilai moral yang kuat di kalangan siswa. Pendidikan kewarganegaraan dapat membangun karakter siswa, terutama di tingkat Sekolah Dasar, melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan berorientasi pada nilai-nilai positif. Lebih lanjut, Hasni, dkk. (2021, hlm. 92) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam konteks studi sosial memiliki urgensi yang tinggi untuk membentuk karakter cerdas bagi generasi muda. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan ini dapat mengajarkan siswa tentang transfer nilai, prinsip, dan proses pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus dirancang dengan baik agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan karakter siswa.

Dalam era revolusi industri 4.0, kurikulum pendidikan kewarganegaraan juga perlu diperbaharui untuk mencakup pengetahuan tentang multikulturalisme dan isu-isu global yang relevan. Nugraha, dkk. (2022, hlm. 12) menekankan bahwa kurikulum harus diarahkan untuk mempersiapkan pendidik yang mampu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan cara yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak

hanya menjadi mata pelajaran yang statis, tetapi juga dinamis dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter warga negara Indonesia juga diungkapkan oleh Pertiwi (2025, hlm.43), yang menunjukkan bahwa pendidikan ini hadir di setiap jenjang pendidikan dan berkontribusi dalam membangun nilai-nilai karakter yang kuat. Pendidikan kewarganegaraan tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh pelajaran lain seperti ilmu sosial dan agama, yang semuanya berkontribusi dalam pembentukan karakter siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan Saskia (2023, hlm. 73) yang menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membangun sikap nasionalisme dan patriotisme di kalangan siswa.

Dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti kemiskinan dan terorisme, pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat relevan. Irfani, dkk. (2021, hlm. 13) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menjadi ujung tombak dalam mempersiapkan generasi yang akan mewarisi bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan karakter yang baik, pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan generasi emas pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan bangsa. Revitalisasi epistemologis pendidikan kewarganegaraan juga menjadi penting dalam konteks ini.

Dalam masyarakat yang majemuk, pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengelola perbedaan dan membangun kesepahaman di antara berbagai kelompok etnis dan budaya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus berfokus pada pengembangan nilai-nilai toleransi dan kerjasama antarwarga negara. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia.

Dalam era global, pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengajarkan siswa tentang pentingnya nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, dan multikulturalisme, serta bagaimana mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks pembelajaran, karakteristik media yang tepat juga menjadi faktor penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Angraini (2017, hlm. 3) menyatakan bahwa media pembelajaran harus mampu

menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai yang diharapkan. Dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan kewarganegaraan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Budiutomo (2013, hlm. 21) yang menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan yang dapat mendewasakan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki misi untuk mengembangkan moral dan karakter bangsa. Sembiring (2021, hlm 87) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan ini harus mampu mengajarkan siswa tentang tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif yang berkaitan dengan sikap dan perilaku siswa. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan juga menjadi fokus penting.

Tuhuteru (2020, hlm. 43) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membantu membina karakter generasi muda dan nilai-nilai demokrasi di daerah yang pernah mengalami konflik. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan ini dapat menjadi alat untuk rekonsiliasi dan pembangunan kembali masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mampu beradaptasi dengan konteks sosial yang berbeda. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam membentuk sikap disiplin siswa.

Di era digital, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga harus diintegrasikan ke dalam kurikulum. Permana (2023, hlm. 82) menekankan bahwa pendidikan ini harus fokus pada pembentukan karakter warga negara digital yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan harus mampu memberikan bekal yang relevan bagi siswa dalam menghadapi tantangan di era digital. Perbandingan pendidikan kewarganegaraan di negara lain juga memberikan wawasan yang berharga. Fauziah Fauziah (2019, hlm. 5) menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanamkan kewarganegaraan melalui pendidikan, yang

dipengaruhi oleh sejarah, ekonomi, dan budaya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mempertimbangkan konteks lokal dan global dalam pengembangannya.

Pendidikan kewarganegaraan harus mampu membangun karakter bangsa sesuai dengan nilai Pancasila di era global. Dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan bangsa. Secara keseluruhan, kajian pustaka mengenai dinamika pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter dan identitas nasional generasi muda. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan karakter siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan.

2.3 Konsep Identitas Nasional

Ilmu pengetahuan dan teknologi terutama Teknologi komunikasi berkembang sangat cepat. Perkembangan perkembangan teknologi tidak dipungkiri membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dirasakan terutama pada masa Pandemi *covid.19* adalah penggunaan aplikasi teknologi yang memungkinkan proses belajar mengajar tetap dapat dijalankan tanpa ada pertemuan langsung/tatap muka antara guru dengan murid, mahasiswa dengan dosen. Pegawai pegawai baik PNS maupun pegawai swasta dapat menjalankan aktifitas pekerjaan dengan WFH (*work from home*).

Dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada revolusi industry 4.0, berkurangnya interaksi secara langsung antar individu dalam masyarakat, berkurangnya komunikasi menjadikan sering terjadinya kesalahan komunikasi atau miskomunikasi. Berkurangnya interaksi menjadikan gejala gejala hidup yang semakin individualis, persoalan persoalan kecil menjadi sebuah persoalan besar yang tidak jarang menimbulkan konflik konflik sosial.

Dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi dengan berkembangnya teknologi internet, dengan leluasa membawa pengaruh dunia luar

masuk ke Indonesia, yang menjadi problematika adalah tidak semua pengaruh tersebut positif bagi pembentukan karakter warga muda. Ketidakmampuan menyaring informasi dan budaya asing menjadikan warga muda terjerumus dalam kehidupan yang kebarat baratan, hedonism, pergaulan bebas, maupun munculnya kenakalan kenakalan remaja dan juga penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang. Kondisi demikian apabila tidak ditangani secara serius akan merusak identitas warga muda.

Sebagai sebuah ilmu yang multidisipliner, Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan aktif dalam mendorong warga negara muda untuk memperkuat identitasnya, terlebih lagi dalam era global saat ini. Manusia tidak bisa melepaskan dari pergaulan internasional, karena pergaulan internasional merupakan bagian dari tujuan keluar bangsa Indonesia. Kaitan global dengan identitas nasional menurut Wijaya Mulya (2021, hlm 24) mengemukakan bahwa :

“Dalam pergaulan internasional tersebut jati diri dan identitas bangsa tidak boleh luntur. Bentuk rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia) harus mampu mengidentifikasi dan mendorong betapa pentingnya persoalan moral, nilai-nilai kepatuhan, menghormati norma-norma sosial, pemeliharaan ketertiban moral dan adanya sanksi pelanggaran”.

Realitas saat ini, nilai-nilai Pancasila di Indonesia mengalami gangguan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memudarnya implementasi nilai-nilai Pancasila ditunjukkan dengan maraknya peristiwa kontraproduktif dalam kehidupan beragama, menurunnya nilai kemanusiaan, konflik kebhinekaan, pemaksaan kehendak tanpa semangat musyawarah dan gotong royong hingga kecurangan dan ketidakadilan yang dialami sebagian orang.

Memudarnya nilai-nilai Pancasila yang merupakan identitas nasional bangsa Indonesia tercermin dari maraknya perilaku sebagian masyarakat yang mengesampingkan ajaran agamanya demi kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Indra dan Budimansyah (2020, hlm 8) mengemukakan bahwa:

“Dalam lingkup ketatanegaraan, masih maraknya korupsi di berbagai lembaga pemerintahan. Aspek lain yang ditonjolkan dalam fenomena lunturnya nilai-nilai Pancasila adalah munculnya gerakan radikalisme atas nama agama yang menimbulkan perlakuan diskriminatif dan perusakan moral dan materialitas dalam suatu Masyarakat”.

Identitas sosial politik menurut Habermas (1990, hlm. 20) sangat terkait dengan nasionalisme, karena nasionalisme merupakan bentuk kesadaran kolektif yang merupakan refleksi budaya yang dapat menyebar melalui komunikasi massa. Selain itu menurut Heater (2009, hlm. 40) Identitas nasional juga dipengaruhi oleh kondisi maupun dinamika sosial politik yang terjadi. Selaras dengan pemikiran Jurgen Habermas, Max Weber (1988, hlm. 39) menyatakan bahwa nilai-nilai budaya yang dijaga dan dipraktikkan dalam suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap perilaku suatu masyarakat tersebut.

Isin dan Wood (1999, hlm. 96) menyatakan Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh pribadi individunya, tindakan individu dipengaruhi oleh orientasinya, walaupun manusia menyadarinya atau tidak. Sikap dan perilaku manusia cermin identitasnya, pengakuan dan fakta bahwa eksistensi dari kebudayaan yang paling tepat dengan melihat adat suatu masyarakat yang mencerminkan identitas masyarakat tersebut.

Identitas dalam masyarakat menurut Mazzini (1906, hlm. 201) akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan komitmen merangkul cinta atas dasar kemanusiaan. Menurut Gellner (1983, hlm. 58) Gagasan tentang cinta tanah air melekat dalam doktrin nasionalis, doktrin nasionalis menyatakan seseorang individu yang mengakui diri mereka sendiri sebagai nasionalis sebagai bagian anggota masyarakat suatu bangsa, dengan keberadaan bangsanya sendiri sejajar dengan keberadaan Negara lain.

Definisi bangsa diuraikan oleh Smith (1991, hlm. 14) bahwa, sebuah bangsa adalah populasi manusia yang menempati wilayah yang sama, memiliki kesamaan sejarah, mitos, massa, budaya publik, dan secara ekonomi maupun hukum terdapat hak dan kewajiban untuk semua anggota. Definisi lain menurut Connor (1993, hlm. 129) bangsa merupakan ikatan psikologis yang pada dasarnya adalah irasional yang mengikat sesama warga negara bersama dan yang seharusnya merupakan inti dari identitas nasional. Ikatan psikologis ini biasanya disebut 'rasa memiliki' (Conno, 1978, hlm. 409) atau 'perasaan sesama' (Geertz, 1963, hlm 490). Menurut Smith (1991, hlm. 74) Ekspresi psikologis seperti itu menunjukkan kedekatan antara individu secara kolektif, yaitu bangsa untuk menganalisis identitas nasional sebagai

konsep yang diperlukan untuk mempelajari gerakan yang membawa bangsa menjadi ada, yaitu nasionalisme.

Menurut Smith (1991, hlm. 74) Kembali pada pembahasan tentang nasionalisme sebagai identitas nasional Smith dan Kedourie memberikan definisi dari ajaran nasionalis, bahwa ada tiga proposisi fundamental. Adapun tiga proposisi fundamental adalah, pertama, dunia terbagi menjadi beberapa negara. Setiap Negara memiliki budaya, sejarah, dan takdirnya sendiri yang membuatnya unik di antara negara lain. Kedua, setiap individu adalah milik suatu bangsa. Kesetiaan pada bangsa mengesampingkan semua loyalitas lainnya. Apalagi sebagian dari individu yang ada bangsa tersebut tidak sepenuhnya menyadari diri mereka sendiri, dan lebih jauh lagi ada asumsi bahwa di negara tersebut, mereka adalah individu atau orang buangan secara sosial dan politik. Ketiga, Negara harus bersatu yang secara otonom memiliki kebebasan mengejar tujuan Negara mereka. Selain itu menurut Kedourie (1992, hlm. 67) Proposisi ketiga ini sebenarnya menyiratkan bahwa bangsa adalah satu-satunya sumber sosial dan sah kekuatan politik, sebagai doktrin nasionalis universalis particular bangsanya.

Smith (1981, hlm 280) mengemukakan bahwa Identitas nasional dan Nasionalisme tidak hanya menegaskan eksistensi bangsa yang spesifik dalam masyarakat. Akan tetapi identitas juga memberikan posisi di dunia untuk dapat membedakan identitas suatu bangsa. Pembicaraan tentang asal-usul etnis suatu Negara, mengacu pada pentingnya simbol atau nyata untuk membentuk identitas nasional. Pemikiran awal asal usul etnis sebagai identitas sebuah bangsa oleh Smith dibantah sendiri, yang menyatakan bahwa konteks wacana filosofis dan sejarah yang berkembang pada abad 17-18 di Eropa, identitas dikonseptualisasikan sebagai kesamaan. Dengan kata lain, anggota satu komunitas bangsa memiliki sejumlah fitur atau karakteristik yang sama, misalnya, bahasa atau budaya yang merupakan penanda identitas mereka. Selanjutnya menurut Triandafyllidou (1997, hlm 87) Pada sisi lain identitas nasional merupakan interaksi atas kesamaan bahasa, tradisi, budaya dengan ciri ciri khususnya yang membedakan dengan identitas nasional negara lainnya.

Adapun menurut Deutsch (1996, hlm. 147) Pemikiran mengenai identitas nasional dalam perkembangannya, sangat berkaitan dengan warga Negara

sebagai pembentuk identitas nasional. Pada sisi lain berkaitan dengan teori nasionalisme, kriteria objektif seperti budaya dan agama saja tidak cukup untuk menentukan kelompok mana yang merupakan suatu bangsa. Mengapa demikian? Karena konsep kebangsaan menurut Connor (1978, hlm. 389) tidak dapat dioperasionalkan dalam pengertian yang spesifik karakteristik seperti lokasi geografis, komposisi agama, atau homogenitas linguistik, hal ini penting untuk menentukan sejauh mana karakteristik atau fitur dalam memperkuat identitas nasionalnya". Selanjutnya Connor (1993, hlm. 376-377) menyatakan bahwa ciri khas sebagai bangsa dengan identitas nasionalnya adalah, memiliki ikatan kebangsaan, ikatan psikologis yang mempertemukan warga Negara didasarkan pada keyakinan bersama walaupun ada ikatan etnis tapi tentu saja bukan semata mata menjadi acuan pembentukan sebuah bangsa, karena hal terpenting adalah kepercayaan diri akan identitas nasionalnya".

Pendapat Connor tentang identitas nasional diperkuat dengan pemikiran Irvine (1993, hlm. 189) dengan memberikan contoh kasus dialek pembentukan Negara Serbia-Kroasia, yang secara jelas menawarkan contoh yang bagus dari proses identitas nasional kebangsaan tersebut. Untuk memperkuat pemikiran pemikiran mengenai proses kebangsaan dengan identitas nasionalnya, dapat dilihat contoh lain yakni, pencarian Konstantinopel oleh Ottoman pada tahun 1453, perjuangan panjang antara Yunani dan Turki. Begitu juga dengan Irlandia, meskipun bahasa Irlandia diganti dengan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari di Irlandia, telah dijadikan simbol keunikan dan keaslian bangsa Irlandia dan telah menekankan kekhasan dari Inggris.

Oleh karena dengan contoh contoh pemikiran s mengenai identitas nasional seperti yang dikemukakan oleh Deutch (1996, hlm 281) mendorong untuk kembali membuat definisi mengenai identitas nasional yang lebih tepat dan eksplisit. Selain itu menurut Turner (1975, hlm. 22) mengemukakan bahwa dengan pendefinisian kembali tentang identitas nasional yang mencakup kekhasan sebuah komunitas/kelompok masyarakat yang secara kultural sebagai bangsa akan menunjukkan keaslian identitasnya.

Menurut Lemaine dkk (1978, hlm. 192) mengatakan identitas nasional menyiratkan keunikan dan pengakuan kesamaan antara anggota masyarakat, yang

menjadikan keunikan menjadi bermakna. Identitas nasional yang terancam dapat dipulihkan dengan cara mencari perbedaan dan keberbedaan, penciptaan, dan kemudian penekanan pada heterogenitas. Perbedaan-perbedaan tersebut perlunya di kontruksi kembali, berdasarkan sejarah, pengalaman sebagai bangsa yang masih relevan, dalam pembentukan bangsa atau kelompok bangsa yang multi nasional. Memang kontruksi bangsa yang baru memberi kontras dengan kelompok bangsa sebelumnya. Akan tetapi ciri khas yang baru sebagai identitas bangsa tetap dapat membedakan dengan identitas kelompok atau bangsa lainya (Gellner, 1983, hlm. 298).

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, kesimpulan yang didapatkan suatu identitas nasional suatu negara pembentukanya tidak hanya berdasarkan kesamaan etnis, bahasa dan sejarahnya saja, akan tetapi identitas nasional dapat dikonstruksi dan dikembangkan dengan menambahkan pada aspek sosio psikologis yakni persamaan keyakinan dan tujuan yang nantinya menjadi ciri khas sebuah bangsa, ciri khas tersebut menjadi pembeda dengan ciri khas negara lain.

Berkaitan dengan Identitas nasional Indonesia Iroyanto (2004, hlm. 4) mengatakan dalam sejarahnya ada tarik ulur yang memicu ketegangan pada proses berbangsa, Tarik ulur didorong oleh konsistensi untuk mempertahankan ciri Indonesia, pada sisi lain adanya kekuatan-kekuatan luar dengan penguasaan teknologi, terutama teknologi komunikasi yang dapat mempengaruhi identitas nasional bangsa Indonesia. Mengapa identitas nasional suatu bangsa menjadi hal yang penting? Karena dengan adanya identitas nasional (*national identity*) ciri atau karakter suatu bangsa akan terlihat dan akan dapat dibedakan dengan ciri maupun karakter bangsa lain, jadi identitas menjadi pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa lain di dunia". (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, hlm. 66)".

Berkaitan dengan proses berbangsa dan bernegara perlu sekiranya suatu identitas Nasional menjadi ciri bangsa Indonesia. Indonesia memerlukan ideologi untuk menunjukkan identitas nasionalnya. Ideologi tidak pernah punah, ideologi tidak pernah hilang, ideologi hanya mengalami kemunduran, kebangkitan dan kemunculan Kembali (Yudohusodo 2008, hlm. 1) Konsep pencarian Ideologi bangsa Indonesia tercermin dalam Nilai-nilai Pancasila,

penggalian substansi nilai Pancasila mampu mengakomodir segala perbedaan dan kemajemukan Indonesia. Pancasila merupakan identitas dan karakter bangsa Indonesia (Kaelan 2007, hlm. 51).

Menurut Kaelan (2007, hlm. 52) Proses penggalian filosofi bangsa yakni Pancasila sejatinya merupakan proses penggalian budaya bangsa dalam menumbuhkan nasionalismenya dan perkembangan positif bahwa penyempurnaan nilai nilai Pancasila secara menjadikan Pancasila menjadi Ideologi yang terbuka (Wiyono, 2012, hlm. 5). Kajian teoritis Pancasila menurut Hadjon (1998, hlm. 71) ditinjau dari sudut teori hukum dan filosofinya menempatkan Pancasila telah menempuh alur dogmatik sebagai landasan Ideal bangsa UUD 1945.

Identitas Nasional yang menunjukkan ke-Indonesiaan adalah bentuk negeri Indonesia yang Negara Kesatuan. Konsep negara kesatuan adalah konsep yang mengakomodir nilai filosofi bangsa yakni Pancasila, Konsep negara kesatuan menjadikan ide ide negara federasi menjadi pengkhianatan terhadap nilai nilai Pancasila (Asshiddiqie, 2006, hlm. 262) Konsep Negara Kesatuan sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945 Dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan: “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan”. Konsep NKRI menjadi rumah idaman dalam kemajemukan bangsa Indonesia yang di balut dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36A UUD 1945 perubahan yang menyatakan: “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Identitas nasional Indonesia selanjutnya adalah sang saka Merah Putih, Lambang Garuda Pancasila dan Bahasa Nasional yaitu Bahasa Indonesia yang tertuang dalam Dalam Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009.

Identitas nasional menurut Putnam (1993) sejatinya merupakan modal sosial bangsa Indonesia. Modal sosial terdiri dari banyak tipe hubungan dan partisipasi, sehingga komponen modal sosial cukup banyak dan bervariasi serta bersifat tidak nyata (*intangible*). Putnam menyatakan bahwa, dalam definisi awal, modal sosial diidentifikasi dengan “sifat-sifat organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi”.

Istilah modal sosial dikemukakan pertama kali oleh Lyda Judson Hanifan (1916) yang meneliti sebab-sebab keberhasilan seorang kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan di Amerika Serikat. Kepala sekolah ini bisa sukses karena dia mempunyai modal sosial yang cukup. Modal sosial, seperti ditulis Hanifan dalam buku berjudul *The Rural School Community Centre*, bukanlah kekayaan atau uang, tetapi berupa kemauan baik, rasa bersahabat dan kerjasama erat yang membentuk kelompok sosial, baik di dalam sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah. Hasilnya, kemajuan tidak hanya dicapai oleh anak didik dalam bidang akademik tetapi juga oleh warga di sekitar sekolah dalam berbagai aspek kehidupan.

2.3.1 Identitas Nasional Mencakup Modal Sosial Bangsa

James Coleman (1988) membuat tulisan dengan judul *Social Capital in The Creation of Human Capital*. Coleman menganalisis proses sosial dengan menggunakan teori pilihan rasional yang sarat dengan prinsip ekonomi. Kesimpulannya, modal sosial berperan menciptakan modal manusia. Jadi, modal sosial bersifat produktif. Modal sosial mencapai puncak ketenarannya ketika Putnam (2000, hlm. 178) menulis bukunya yang monumental berjudul *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. Lewat *Bowling Alone*, Putnam telah memukul syaraf yang amat penting dan amat peka tentang kemerosotan partisipasi warga di Amerika Serikat akibat hancurnya kepercayaan terhadap penguasa publik.

Negara juga bisa mendorong terciptanya modal sosial secara tak langsung dengan cara menyediakan barang-barang publik yang diperlukan, khususnya hak kekayaan dan keselamatan publik. Tapi negara punya dampak negatif yang amat serius pada modal sosial ketika negara mulai melakukan kegiatan yang sebenarnya lebih baik diserahkan kepada sektor privat.

Sementara modal fisik mengacu pada benda-benda fisik dan modal manusia mengacu pada sifat-sifat individu, sedang modal sosial mengaju pada hubungan antara individu-individu- jaringan sosial dan norma-norma resiprositas dan kepercayaan yang muncul dari mereka. Dalam pengertian ini, modal sosial berhubungan erat dengan apa yang disebut "*civic virtues*" (kebaikan moral). Mengapa modal sosial itu penting.? Karena:

- 1) “Pertama, modal sosial memungkinkan warga negara untuk menyelesaikan masalah-masalah kolektif secara lebih mudah. Orang-orang sering kali berkinerja lebih baik jika mereka saling bekerja sama satu sama lainnya. Tetapi setiap individu ingin memperoleh manfaat lebih dengan melalaikan tanggung jawab, berharap orang lain bekerja untuk dirinya. Penyelesaian dilemaini paling baik dilakukan melalui mekanisme kelembagaan yang punya kekuasaan untuk menjamin kepatuhan terhadap perilaku yang dikehendaki bersama. Norma-norma sosial dan jaringan- jaringan yang memperkuatnya menyediakan mekanisme tadi.
- 2) Kedua, modal sosial melumasi roda-roda yang memungkinkan masyarakat untuk maju secara mulus. Bila orang-orang percaya dan saling mempercayai dan jika mereka melakukan interaksi berulang-ulang dengan sesama warga negaranya, maka urusan setiap hari dan transaksi sosial akan lebih murah. alias berjalan dengan lancar.
- 3) Cara ketiga untuk memperbaiki modal sosial adalah dengan cara memperluas kesadaran perihal bagaimana dalam banyak hal nasib saling berhubungan. Kembali kepada modal sosial yang terkait dengan kebaikan moral dan modal fisik, maka Indonesia dianugerahi kedua-duanya yang tidak ternilai jika dihitung secara kuantitatif” (Putnam: 2000).

Berdasarkan data dari Detik.com (2020) dapat dijelaskan modal sosial bangsa Indonesia sebagai berikut:

- 1) Kekayaan dan kemajemukan bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan yang tidak terbantahkan. Suku bangsa Indonesia tidak kurang 470 suku bangsa, jumlah ratusan suku bangsa tersebut tentunya menghasilkan *culture* budaya yang luar biasa. Potensi kekayaan Bahasa lokal, kearifan lokal menjadi potensi yang unik dan kuat dalam memperkuat identitas bangsa Indonesia.
- 2) Jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau. Dengan jumlah kepulauan sebanyak tersebut maka Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
- 3) Luas Indonesia mencapai 5.193.250 km² dengan rincian, luas daratan mencapai 1.919.440 km² dan luas wilayah lautan mencapai 3.273.810 km². Panjang dari sabang sampai Merauke mencapai 5.120 km. Panjang sejauh ini jika ditempuh dengan pesawat mencapai 12 jam penerbangan. Sebagai gambaran jarak tempuh 12 jam penerbangan sama dengan jarak tempuh penerbangan jamaah haji Indonesia ke Jeddah Arab Saudi.

Muhamad Subkhan, 2025

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL
PERSPEKTIF GLOBAL (STUDI DESKRIPTIF DI UPI, UNJ, dan UNNES)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 4) Dalam situs Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi disebutkan, Rujukan Nasional Data Kewilayahan RI menyebutkan luas wilayah Indonesia baik itu darat dan perairan adalah 8.300.000 km². Rujukan nasional data kewilayahan RI, yang salah satunya luas laut Indonesia itu dikerjakan sejak tahun 2015 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL.
- 5) Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km².
- 6) Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km².
- 7) Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km².
- 8) Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km².
- 9) Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km².
- 10) Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km².
- 11) Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km².
- 12) Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km, sedangkan panjang jarak dari selatan ke utara, lebih dari 1.700 km. Panjang pantai Indonesia sekitar 104.000 km, menduduki urutan nomor empat sebagai negara yang memiliki pantai terpanjang di dunia.
- 13) Sumber daya alam hutan, luas hutan Indonesia mencapai 99 juta hektar dengan segala kekayaan flora dan faunanya dan potensi pariwisata.
- 14) Sumber daya alam laut Indonesia, menurut *Kompas*, potensi ikan laut di Indonesia mencapai sekitar 6 juta ton/tahun. Banyaknya ikan yang berada di lautan Indonesia tentu saja sangat bermanfaat dalam kegiatan budidaya ikan. Selain itu, potensi sumber daya alam laut di Indonesia juga berguna untuk kegiatan pariwisata.
- 15) Sumber daya alam batubara, negara kelima terbesar di dunia yang menghasilkan batubara. Daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia berada di pulau Kalimantan. Tercatat, menurut Katadata, Kalimantan menyimpan cadangan batubara sebesar 25,84 miliar ton dan sumber daya sebesar 88,31%. Dengan demikian, Kalimantan menyimpan sebanyak 62,1% batubara.

- 16) Sumber daya alam minyak bumi, Selain batubara, minyak bumi juga kerap digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Cadangan minyak bumi di Indonesia akan tersedia hingga 9,5 tahun mendatang. Lalu, cadangan gas bumi Indonesia mencapai 19,9 tahun.
- 17) **Sumber daya alam gas.** Sama seperti minyak bumi, sumber daya gas alam di Indonesia juga memiliki cadangan yang sangat banyak. Bahkan, diperkirakan cadangan gas di Indonesia sampai 2,8 triliun meter kubik.
- 18) Peta kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Tabel 2.1
Peta Kekayaan Sumber daya alam Indonesia

Daerah	Sumber Daya Alam
Kalimantan	Hutan, gas alam, batubara
Sumatera	Hutan, batubara, gas alam
Jawa Tengah	Gas alam
Jawa Timur	Gas alam
Riau	Gas alam
Maluku	Gas alam
Papua	Emas, gas alam
Sulawesi	Nikel

Sumber: (diolah oleh peneliti)

2.3.2 Teori Teori Identitas Nasional

Beberapa teori utama tentang identitas nasional antara lain dijelaskan oleh:

- 1) Teori Identitas Nasional sebagai kombinasi dari elemen etnis dan symbol symbol budaya, oleh Anthony D. Smith (1986, hlm. 15-20) “Identitas suatu bangsa atau negara terbentuk dan dipertahankan. Teori ini mencakup berbagai aspek seperti sejarah, budaya, politik, dan sosiologi untuk memahami proses pembentukan identitas kolektif yang membedakan satu bangsa dari bangsa lainnya”
- 2) Teori: Identitas nasional sebagai hasil dari konstruksi sosial dan rekayasa Sejarah. Teori ini disampaikan oleh Eric Hobsbawm (1990, hlm. 1-3) Bahwa tradisi nasional sering kali merupakan hasil rekayasa atau penemuan yang dilakukan oleh negara atau kelompok tertentu untuk tujuan politis.

Muhamad Subkhan, 2025

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL
PERSPEKTIF GLOBAL (STUDI DESKRIPTIF DI UPI, UNJ, dan UNNES)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 3) Teori: Identitas nasional sebagai hasil dari proses hibriditas dan negosiasi. Teori ini disampaikan oleh Hommi K Bhabha (1994, hlm. 54-56) Bahwa identitas nasional adalah hasil dari interaksi dan negosiasi antara berbagai identitas budaya yang berbeda, menciptakan suatu identitas yang hibrida.
- 4) Teori: Identitas nasional sebagai "komunitas terbayang" (*Imagined Communities*). Teori ini dikemukakan oleh Benedict Anderson (1983, hlm. 5-7) Bangsa adalah komunitas politik yang terbayang karena para anggota dari komunitas ini tidak akan pernah mengenal sebagian besar dari anggota lainnya, namun mereka tetap memiliki imajinasi akan kebersamaan mereka sebagai suatu bangsa".
- 5) Teori: Identitas nasional sebagai hasil dari kehendak bersama dan kesepakatan kolektif. Teori ini dikemukakan oleh Ernest Renan (1882, hlm. 8-9) Bahwa suatu bangsa adalah hasil dari kehendak bersama untuk hidup bersama dan ingatan akan warisan bersama, serta bukan berdasarkan ras, bahasa, agama, atau geografis.

2.3.3 Indikator Identitas Nasional Menurut Para Ahli (dunia)

Menurut Para Ahli indikator dan pemikiran identitas nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Bendict Anderson
Anderson (1991, hlm. 6) dalam bukunya *Imagined Communities* memperkenalkan konsep "komunitas terbayang" (*imagined communities*), yang menggambarkan bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan karena anggotanya, meskipun tidak saling mengenal, merasa memiliki ikatan persatuan.
- 2) Anthony Smith.
Smith (199, hlm. 14) mengemukakan teori etnosymbolisme yang menekankan pentingnya mitos, memori, simbol, dan nilai-nilai bersama dalam pembentukan identitas nasional.
- 3) Erness Gellner.
Gellner (1983, hlm. 53) mengatakan bahwa nasionalisme adalah produk dari modernisasi, khususnya transformasi masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang memerlukan budaya tinggi yang homogen. Eric Hobsbawn (1983, hlm. 1) mengembangkan konsep "tradisi yang diciptakan" (*invented*

traditions), yang berpendapat bahwa banyak elemen identitas nasional merupakan konstruksi sosial yang sengaja diciptakan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan loyalitas.

4) Clifford Geertz.

Geertz (1973, hlm. 89) mengemukakan bahwa pentingnya simbol dan budaya dalam pembentukan identitas nasional, dengan menekankan peran simbol-simbol budaya yang mendefinisikan keunikan bangsa.

Dari beberapa pemikiran para ahli dunia di atas maka parameter atau indikator identitas nasional dapat sebagai berikut:

- 1) Simbol-simbol nasional, dan artefak budaya yang dapat mewakili identitas nasional seperti Bahasa nasional, sastra, bendera, lagu kebangsaan.
- 2) Upacara/perayaan hari nasional, cerita/narasi sejarah Bersama, mitos/legenda nasional, monumen dan situs bersejarah.
- 3) Pendidikan nasional yang terstandarisasi dengan Homogenitas budaya dalam masyarakat industri.
- 4) Sejarah yang dimanipulasi untuk tujuan nasionalis melalui Penggunaan media massa untuk menyebarkan ideologi nasional.

2.3.4 Indikator Identitas Nasional Menurut Para Ahli Indonesia.

Peneliti berupaya untuk mencari keseimbangan dalam mencari literasi literasi dengan memadukan pemikir pemikir dari luar negeri, maupun dari Indonesia. Untuk ahli Indonesia beberapa Pemikir dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

1) Soedjatmoko.

Soedjatmoko (1984, hlm. 89) mengatakan bahwa pentingnya sejarah bersama dan pengalaman kolektif dalam pembentukan identitas nasional. Menurutnya, identitas nasional Indonesia dibentuk melalui perjuangan bersama melawan kolonialisme dan aspirasi untuk mencapai kemerdekaan.

2) Yudi Latif.

Latif (2011, hlm. 23) mengatakan bahwa Identitas nasional Indonesia dibangun di atas dasar Pancasila sebagai ideologi negara yang menyatukan beragam etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai landasan

moral dan etika yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Mochtar Lubis.

Lubis (1879, hlm. 45) mengatakan bahwa Pentingnya kesadaran sosial dan tanggung jawab dalam membangun identitas nasional. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti korupsi dan ketidakadilan, yang dapat menghambat pembentukan identitas nasional yang kuat.

4) Nurcholis Madjid.

Madjid (1995, hlm. 137) mengatakan bahwa identitas nasional Indonesia harus berbasis pada nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam agama-agama di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pluralisme dan toleransi antar umat beragama sebagai fondasi identitas nasional.

5) Koentjaraningrat.

Koentjaraningrat (1985, hlm. 75) mengatakan bahwa pentingnya budaya sebagai dasar identitas nasional. Ia menekankan bahwa kebudayaan Indonesia yang beragam harus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas nasional yang unik.

Dari beberapa pemikiran para ahli Indonesia di atas maka parameter atau indikator identitas nasional sebagai berikut:

- 1) Pengamalan nilai-nilai Pancasila, Kesatuan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika). Kesadaran kolektif akan identitas nasional berbasis ideologi negara
- 2) Kesadaran sosial dan tanggung jawab dengan Penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi, dan adanya Pendidikan karakter yang menumbuhkan rasa cinta tanah air
- 3) Pluralisme dan toleransi antaragama dengan mengembangkan nilai nilai spiritual dan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan mengedepankan Dialog antaragama sebagai upaya membangun kesatuan nasional
- 4) Pelestarian budaya lokal dan tradisional dengan Pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya serta Promosi kebudayaan sebagai identitas nasional.

Dari pemikiran para ahli tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa identitas nasional sebuah bangsa dalam pembentukannya tidak hanya berdasarkan kesamaan etnis, bahasa dan sejarahnya saja, akan tetapi identitas nasional dapat dikonstruksi dan dikembangkan dengan menambahkan pada aspek sosio psikologis yakni persamaan keyakinan dan tujuan yang nantinya menjadi ciri khas sebuah bangsa, yang ciri khas atau identitasnya tersebut dapat membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Indikator identitas nasional adalah:

- 1) Pengamalan nilai-nilai Pancasila, Kesatuan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika). Kesadaran kolektif akan identitas nasional berbasis ideologi negara
- 2) Kesadaran sosial dan tanggung jawab dengan Penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi, dan adanya Pendidikan karakter yang menumbuhkan rasa cinta tanah air
- 3) Pluralisme dan toleransi antar agama dengan mengembangkan nilai nilai spiritual dan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan mengedepankan Dialog antaragama sebagai upaya membangun kesatuan nasional
- 4) Pelestarian budaya lokal dan tradisional dengan Pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya serta promosi kebudayaan sebagai identitas nasional.
- 5) Simbol-simbol nasional, dan artefak budaya yang dapat mewakili identitas nasional seperti Bahasa nasional, sastra, bendera, lagu kebangsaan.
- 6) Upacara/perayaan hari nasional, cerita/narasi sejarah Bersama, mitos/legenda nasional, monumen dan situs bersejarah.
- 7) Pendidikan nasional yang terstandarisasi dengan Homogenitas budaya dalam masyarakat industri.
- 8) Sejarah yang dimanipulasi untuk tujuan nasionalis melalui Penggunaan media massa untuk menyebarkan ideologi nasional.

2.3.5 Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan identitas Nasional

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam penguatan identitas nasional, terutama dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan agama. Dalam era global yang semakin pesat,

tantangan terhadap identitas nasional semakin kompleks, sehingga pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan dan memperkuat jati diri bangsa. Menurut Dewi (2025, hlm. 24), pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai strategi untuk mempertahankan identitas nasional di tengah arus global yang dapat mengikis nilai-nilai lokal dan budaya bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan tata negara, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang harus dimiliki oleh setiap warga negara.

Dalam konteks ini, Mulyani (2025, hlm. 32) menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan global (GCED) yang mampu mempersiapkan individu menghadapi tantangan global di abad ke-21. GCED berperan dalam membangun kesadaran akan identitas nasional sambil tetap menghargai keragaman global. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan perspektif global, sehingga siswa tidak hanya memahami identitas nasional mereka, tetapi juga mampu berkontribusi dalam konteks global. Hal ini sejalan dengan pandangan Fauziah yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia, harus disesuaikan dengan konteks sejarah, ekonomi, dan budaya masing-masing.

Pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai media untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Haq (2022, hlm. 76) menegaskan bahwa Pancasila harus diterapkan dalam setiap aspek pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter dan identitas nasional yang kuat. Selain itu, Putri (2023, hlm. 67) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus diajarkan secara reflektif, di mana siswa diajak untuk berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi masalah sosial yang ada. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme dan berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam membangun karakter bangsa yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia. Sembiring menjelaskan bahwa PKn memiliki misi untuk membentuk warga negara

yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang multikultural, di mana setiap individu perlu menghargai perbedaan dan berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Genika menambahkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengaitkan antara pendidikan karakter dan identitas nasional, sehingga siswa dapat memahami pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun rasa cinta tanah air dan nasionalisme di kalangan generasi muda. Hal ini sangat penting, terutama di tengah tantangan global yang dapat mengikis rasa kebangsaan. Menurut Usmi (2023, hlm. 45), pendidikan kewarganegaraan harus membantu siswa untuk mengembangkan keterikatan pada komunitas lokal dan global, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus mampu mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, yang merupakan bagian dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

Dalam rangka memperkuat identitas nasional, pendidikan kewarganegaraan juga perlu melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Murdiono, dkk. (2020, hlm. 34) menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai elemen masyarakat untuk membangun nasionalisme, terutama di daerah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri dalam mempertahankan identitas nasional. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan pendidikan kewarganegaraan dapat lebih efektif dalam membangun karakter dan identitas nasional yang kuat di kalangan generasi muda.

Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam penguatan identitas nasional. Melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, siswa diharapkan dapat memahami dan menginternalisasi identitas nasional mereka, serta berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi alat yang efektif dalam menghadapi tantangan global dan membangun masyarakat yang berkeadilan dan beradab.

2.4 Konsep Perspektif Global Mahasiswa.

Morais dan Ogdon (dalam Carabain et all, 2012) “Aku adalah bagian dari dunia (*origin to be the world*)”, Pernyataan ini sangat berpikir jauh ke depan, dengan kesadaran bahwa individu tidak sendiri tinggal di bumi ini. *Diogenes* pun menyatakan aku warga dunia. Pernyataan kedua tokoh ini disampaikan pada 4-5 abad sebelum Masehi, artinya pemikiran kewarganegaraan global sudah dibicarakan sejak manusia memahami eksistensi dirinya sebagai bagian dari sebuah masyarakat. Pemikiran pemikiran kewarganegaraan senantiasa dirumuskan dengan tentunya bertujuan untuk dunia yang lebih baik lagi.

Pendidikan kewarganegaraan menurut Jamaludin & Alanur (2021) sebenarnya memiliki peran dalam mendorong peserta didik untuk memiliki perspektif global yaitu kemampuan untuk memahami suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Pendidikan kewarganegaraan mendorong warga muda untuk memiliki ikatan dalam komunitas warga global, rasa tanggung jawab, daya saing global, dan kemauan untuk berintegrasi dengan perubahan sosial. Tentang arah Pendidikan Pendidikan kewarganegaraan yakni, pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk nilai nilai kemanusiaan, menjaga persatuan dalam perbedaan dan kemajemukan sehingga mampu berpartisipasi dan beradaptasi di lingkungan global manapun.

Gultom dkk (2019, hlm. 21) mengatakan bahwa kontribusi nyata warga yang demikian ini akan berpengaruh pada kebijakan atau regulasi dari negara. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, guna menyiapkan warga muda berkiprah dalam dunia yang tanpa sekat, dunia global.

2.4.1 Teori-Teori Dunia yang Global.

Terkait dengan Perspektif global dapat Peneliti sampaikan teori teori teori utama tentang dunia yang global.

1. Teori Modernisasi.

Teori ini dikemukakan oleh Rostow (1960, hlm. 4-16) mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang dapat dicapai dengan mengikuti jejak negara-negara maju. Proses ini melibatkan perubahan struktural yang mencakup urbanisasi, industrialisasi, dan pendidikan massal”.

Muhamad Subkhan, 2025

REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL PERSPEKTIF GLOBAL (STUDI DESKRIPTIF DI UPI, UNJ, dan UNNES)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Teori Ketergantungan

Teori ini dikemukakan oleh Frank (1967, hlm. 23) yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dikendalikan dan dieksploitasi oleh negara-negara maju, sehingga menciptakan ketergantungan yang menghambat kemajuan ekonomi”.

3. Teori Sistem Dunia

Teori ini dikemukakan oleh Wallerstein (1974, hlm. 150) yang menyatakan bahwa dunia merupakan satu sistem ekonomi global yang dibagi menjadi negara inti, semi-periferi, dan periferi, di mana negara inti mengeksploitasi negara periferi.

4. Teori Globalisasi

Teori ini dikemukakan oleh Robertson (1992, hlm. 54) yang berfokus pada proses globalisasi yang meningkatkan interkoneksi dan interdependensi antar negara dalam hal ekonomi, budaya, dan politik.

5. Teori Poskolonialisme.

Teori ini dikemukakan oleh Said (1978, hlm. 201) yang menyoroiti dampak kolonialisme dan neokolonialisme pada identitas, budaya, dan politik negara-negara bekas jajahan, serta menantang dominasi narasi barat dalam memahami era global.

6. Teori Ekologi Politik Global.

Teori ini dikemukakan oleh Bryant dan Bailey (1997, hlm. 78) yang menganalisis hubungan antara politik global, ekonomi, dan lingkungan, serta bagaimana kekuatan global mempengaruhi dan mengatur ekosistem dan sumber daya alam.

Dari beberapa teori yang telah di sampaikan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa setiap hubungan setiap negara maupun antar negara maupun beberapa negara, senantiasa menghasilkan dinamika dunia yang global.

2.4.2 Konsep dan Indikator Perspektif Global dari Pemikiran ahli dari Luar Negeri.

Beberapa konsep mengenai perspektif global dikemukakan oleh beberapa ahli, baik ahli dari luar negeri maupun ahli dari Indonesia. peneliti sengaja

menyandingkan kedua belah pihak pemikiran para ahli untuk mendapatkan gambaran yang seutuhnya.

1) T.H Green.

Konsep kewarganegaraan global dirumuskan oleh Green (2012, hlm. 91-120) dengan pandangannya sebagai berikut:

1. “Pertama, *Global citizenship as a choice and a way of thinking*.
Walaupun pada awalnya manusia dilahirkan dalam status dan bangsa yang berbeda, akan tetapi untuk tahap selanjutnya manusia tidak dapat berdiam diri tanpa berinteraksi sebagai bagian warga global, keterlibatannya dalam isu-isu global sangat dibutuhkan tanpa meninggalkan karakternya.
2. Kedua, *Global citizenship as self awareness and awareness of others*.
Agama boleh beda, suku, ras pun boleh beda, akan tetapi perbedaan-perbedaan pada manusia tidak boleh menghilangkan hakikat kemanusiaan untuk mencintai sesama manusia, menghormati sesama manusia atas dasar kemanusiaan yang merupakan anugerah Tuhan..
3. Ketiga, *Global Citizenship as they practice cultural empathy*.
Individu yang mampu berkompetensi adalah individu yang memiliki kompetensi, kompetensi dapat dibentuk dengan Pendidikan global, empati Pendidikan global mendorong individu berkiprah nyata dalam percaturan global dalam praktik nyata budaya
4. Keempat, *Global Citizenship as the cultivation of principled decision making*
Tidak ada manusia maupun negara yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri, maka harus ada kesadaran dan tanggung jawab moral bahwa manusia harus saling membantu, karena manusia saling kebergantungan satu sama lain (interdependensi)
5. Kelima, *Global citizenship as participation in a social and political life of one's community*,
Setiap orang harus mampu berpartisipasi dalam mewujudkan dunia yang damai, dunia yang aman yang kontribusinya dapat dimulai dari tataran lokal, regional maupun internasional dalam semua komunitas”.

2) Anthony Giddens

“Giddens (1990, hlm. 64) mendefinisikan globalisasi sebagai *“the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa”* (peningkatan hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas yang terpisah sehingga peristiwa lokal dibentuk oleh kejadian yang terjadi di tempat yang jauh dan sebaliknya”.

3) Roland Robertson.

Roland Robertson (1995, hlm. 25) memperkenalkan konsep "*glocalization*," yang menunjukkan bahwa global melibatkan interaksi antara global dan lokal, di mana elemen global diadopsi dan disesuaikan dalam konteks lokal.

4) Immanuel Walleirstein

Immanuel Wallerstein (1974, hlm. 349) mengembangkan teori sistem dunia yang melihat dunia sebagai sistem ekonomi-politik yang terintegrasi, terdiri dari pusat (*core*), semi-pinggiran (*semi-periphery*), dan pinggiran (*periphery*).

5) Saskia Sassen

Saskia Sassen (2001, hlm. 3) meneliti tentang kota-kota global dan berpendapat bahwa kota-kota seperti New York, London, dan Tokyo menjadi pusat utama dalam jaringan ekonomi global.

6) Ulrich Beck

Ulrich Beck (1992, hlm. 21) memperkenalkan konsep "masyarakat risiko" yang menyoroti bahwa era global menciptakan risiko global seperti perubahan iklim dan krisis ekonomi yang membutuhkan solusi global.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan indikator dari perspektif global menurut ahli dari luar yakni:

- 1) Kewarganegaraan global sebagai pilihan dan cara berpikir dan sebagai kesadaran diri dan kesadaran orang lain.
- 2) Kewarganegaraan Global ketika mereka mempraktikkan empati budaya dalam partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik komunitas seseorang
- 3) Kewarganegaraan Global sebagai penanaman pengambilan keputusan yang berprinsip
- 4) Intensifikasi hubungan sosial global dan Pengaruh peristiwa global terhadap peristiwa lokal dan sebaliknya
- 5) Kombinasi unik dari elemen global dan lokal dalam berbagai aspek kehidupan
- 6) Klasifikasi negara-negara dalam sistem dunia (*core*, *semi-periphery*, *periphery*).

- 7) Hubungan ekonomi dan politik antar negara yang membentuk sistem global dengan Peran kota-kota global sebagai pusat keuangan dan informasi.
- 8) Arus finansial dan informasi yang terpusat di kota-kota global
- 9) Identifikasi risiko global yang muncul akibat era global dan Pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi risiko global.

2.4.3 Konsep dan Indikator Perspektif Global dari Pemikiran ahli dari Indonesia.

- 1) Nurcholish Madjid (Cak Nur).

Menurut Majdid (1995, hlm. 210) mengatakan bahwa “Pentingnya keterbukaan dan dialog antar budaya dalam era global. Ia percaya bahwa era global harus dilihat sebagai peluang untuk memperkaya budaya nasional melalui interaksi dengan budaya lain, sambil tetap menjaga identitas nasional

- 2) Mochtar Lubis

Menurut Lubis (1978, hlm. 53) mengatakan bahwa “Pentingnya etika dan moralitas dalam menghadapi tantangan global. Ia menyoroti bahwa era global membawa berbagai tantangan seperti korupsi dan ketidakadilan yang harus dihadapi dengan memperkuat nilai-nilai etika”.

- 3) Anies Baswedan

Menurut Baswedan (2012, hlm. 27) mengatakan bahwa “Pentingnya pendidikan dalam membentuk perspektif global. Menurutnya, sistem pendidikan harus dirancang untuk menghasilkan individu yang mampu berpikir kritis dan memahami dinamika global, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai lokal”.

- 4) Yudi Latif.

Latif (2011, hlm. 120) mengatakan bahwa “Perspektif global harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang identitas nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu berperan aktif dalam tatanan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang beragam dan Bersatu”.

5) Selo Soemardjan.

Soemardjan (2001, hlm. 67) mengemukakan bahwa “Pentingnya adaptasi sosial dan budaya dalam menghadapi era global. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan akar budaya lokal”

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan indikator dari perspektif global menurut ahli dari luar yakni:

- 1) Keterbukaan terhadap budaya dan ide-ide global melalui dialog antar budaya dan antaragama, serta Penguatan identitas nasional melalui interaksi global
- 2) Peningkatan kesadaran etika dan moralitas dalam Masyarakat melalui Penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi.
- 3) Pendidikan karakter untuk menghadapi tantangan global melalui Kurikulum pendidikan yang mencakup isu-isu global, dan Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis.
- 4) Penguatan nilai-nilai lokal dalam Pendidikan dengan Pemahaman mendalam tentang sejarah dan identitas nasional, melalui Partisipasi aktif dalam forum-forum internasional, dengan tetap menga Pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam konteks global
- 5) Adaptasi sosial dan budaya terhadap perubahan global., dengan tetap menjaga Pelestarian dan penguatan budaya lokal.
- 6) Inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan global

2.4.4 Konsep Pendidikan kewarganegaraan dengan Perspektif Global.

Pendidikan kewarganegaraan menurut Jamaludin & Alanur (2021) sebenarnya memiliki peran dalam mendorong peserta didik untuk memiliki perspektif global yaitu kemampuan untuk memahami suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Pendidikan kewarganegaraan mendorong warga muda untuk memiliki ikatan dalam komunitas warga global, rasa tanggung jawab, daya saing global, dan kemauan untuk berintegrasi dengan perubahan sosial. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk nilai nilai kemanusiaan, menjaga persatuan dalam perbedaan dan kemajemukan sehingga mampu berpartisipasi dan beradaptasi di lingkungan global manapun.

Kontribusi nyata warga yang demikian ini akan berpengaruh pada kebijakan atau regulasi dari negara (Gultom dkk., 2019). Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, guna menyiapkan warga muda berkiprah dalam dunia yang tanpa sekat, dunia global.

Rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan dengan mengarahkan bentuk rekonstruksi dengan menanamkan dan mengajarkan pendidikan kewarganegaraan dalam rangka memperkuat perspektif global generasi muda Indonesia. Rekonstruksi ini berimplikasi semua komponen harus bersama-sama memberikan pemahaman dan pengajaran kewarganegaraan dalam rangka memperkuat wawasan global generasi muda Indonesia. Sehingga dengan tertanamnya nilai ke Indonesiaan dalam diri pemuda, maka akan tertanam pemikiran yang terbuka dan berwawasan global.

Rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan menurut Branson (1998) terkait dengan tiga komponen/domain utama Kompetensi wawasan global warga negara tersebut pada hakikatnya berkaitan dengan tiga kompetensi utama yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) kecakapan warga negara (*civic skill*) dan watak warga negara (*civic disposition*).

1) Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*).

Dengan bekal pengetahuan kewarganegaraan akan tumbuh warga muda yang paham akan hakikat dirinya, memahami hakikatnya dalam bermasyarakat maupun bernegara, sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya ada kesadaran untuk menjadi warga yang baik, warga yang cerdas.

2) Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skill*).

Kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) menurut Bahmueller (1997, hlm. 39) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab.

Sebagaimana menurut Patrick & Vontz (2011, hlm. 41) *Participatory skills of citizenship in a democracy (participatory civic skills) : a) Interacting with other*

citizens to promote personal and common interests, b) Monitoring public events and issues, c) Deliberating and making decisions about public policy issues, d) Influencing policy decisions on public issues, e) Implementing policy decision on public issues, f) Taking action to improve political/civic life. Dimensi *civic skills* ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan untuk berperan secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari peserta didik, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran secara aktif warga negara.

Untuk dapat berperan secara aktif tersebut menurut Bahmueller (1997, hlm. 39) diperlukan pengetahuan tentang konsep yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ini secara kontekstual dan kecenderungan untuk bertindak sesuai watak dari warga negara.

3) Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*).

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. secara konseptual, *civic disposition* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni: Civility (*respect and civil discourse*), *individual responsibility, self discipline, and civic mindedness, open mindedness (openness, scepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles)* (Quigley, dkk, 1991, hlm.13-14). Artinya kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi dan keragaman, kesabaran dan keajegan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Warga negara tidak bisa mengisolasi diri dan harus memiliki wawasan global di era disrupsi yang terus bergerak begitu cepat dan massif, oleh karena itu pembentukan dan penguatan warga negara yang berwawasan global (*global citizen*) mutlak

diperlukan. Pendidikan global (*global education*) melalui Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan untuk membekali warga negara dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan global tersebut. Tiga kompetensi utama wawasan global warga negara, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan watak kewargaan diperlukan dalam rangka menghadapi dan menjalani era digital. Gagasan tersebut dapat memperkuat ilmu pengetahuan sosial termasuk di dalamnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk lebih berorientasi kepada pendidikan berwawasan global, dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warga dunia (*global citizen*) yang memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat bangsa, dan anggotan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini.

Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Keterbukaan terhadap budaya dan ide-ide global melalui dialog antar budaya dan antar agama, serta Penguatan identitas nasional melalui interaksi global
- b. Peningkatan kesadaran etika dan moralitas dalam Masyarakat melalui Penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi.
- c. Pendidikan karakter untuk menghadapi tantangan global melalui Kurikulum pendidikan yang mencakup isu-isu global, dan Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis.
- d. Penguatan nilai-nilai lokal dalam Pendidikan dengan Pemahaman mendalam tentang sejarah dan identitas nasional, melalui Partisipasi aktif dalam forum-forum internasional, dengan tetap menga Pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam konteks global
- e. Adaptasi sosial dan budaya terhadap perubahan global., dengan tetap menjaga Pelestarian dan penguatan budaya lokal.
- f. Inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan global
- g. Keterbukaan terhadap budaya dan ide-ide global melalui dialog antarbudaya dan antar agama, serta penguatan identitas nasional melalui interaksi global
- h. Peningkatan kesadaran etika dan moralitas dalam Masyarakat melalui Penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi.

- i. Pendidikan karakter untuk menghadapi tantangan global melalui Kurikulum pendidikan yang mencakup isu-isu global, dan Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis.
- j. Penguatan nilai-nilai lokal dalam Pendidikan dengan pemahaman mendalam tentang sejarah dan identitas nasional, melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional, dengan tetap menga pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam konteks global
- k. Adaptasi sosial dan budaya terhadap perubahan global., dengan tetap menjaga Pelestarian dan penguatan budaya lokal.
- l. Inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan global

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai pendukung penelitian, maka akan peneliti paparkan penelitian yang terkait:

1. **Ahmad Misbahul Anam (2016)**, yang berjudul *Konsep Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Kewarganegaraan*. Hasil penelitian ini dapat dijabarkan bahwa ada pengaruh agama Islam dalam budaya Indonesia. Pancasila sebagai filsafat negara akan hidup subur dan terjamin kelestariannya jika umat Islam bersungguh-sungguh memahami agamanya. Umat Islam menjadikan agama sebagai pandangan hidup dalam mempengaruhi seluruh perilaku bermasyarakat. Hasil penelitian disertasi ini juga menunjukkan bahwa HAMKA merupakan tokoh Islam Indonesia yang memiliki gagasan dan pemikiran yang komprehensif terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Ciri utama dari gagasannya tentang pendidikan kewarganegaraan adalah menekankan ikatan agama sebagai sumber nilai, khususnya Islam. Menurut penelitian ini tidak dapat dipisahkan antara Islam dengan Kewarganegaraan, karena dalam Islam mengajarkan tentang mencintai negaranya. Tidak dapat dipisahkan antara pendidikan kewarganegaraan dengan Sejarah nasional Indonesia, yang menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu yang multi disipliner.
2. **Rochiati Wiriaatmadja (1992)**, yang berjudul *Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia Dalam Pembentukan Identitas Nasional: Upaya Peraihan*

Nilai-Nilai Integralistik Dalam Proses Sosialisasi Dan Enkulturas Berbangsa Di Kalangan Siswa SMAK 1 BPK Penabur Di Bandung.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, menanamkan identitas nasional pada etnis tertentu menjadi tantangan tersendiri (etnik tiong hoa) melalui pengajaran sejarah nasional memberikan pemahaman "Bagaimanakah proses sosialisasi dan enkulturas berbangsa melalui Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia itu berlangsung ?",

Peran besar dari seorang pendidik (sejarah) dalam mendorong siswanya mempelajari etnisitas dan nasionalisme memberikan pengaruh positif dalam identitas nasional peserta didik.

3. **Mukhamad Murdiono (2014)** yang berjudul *Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda Berkarakter Pancasila.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif global harus diawali dengan kesadaran akan nilai nilai Pancasila. Nilai Kemanusiaan menjadi gerbang utama dalam berinteraksi dalam kehidupan global. Catatan penting dalam penelitian ini adalah bahwa nilai nilai Pancasila tidak hanya dijadikan hapalan dan retorika saja, namun harus betul betul dipraktikkan dalam kehidupan nyata dalam berbangsa dan bernegara.

4. **Sakala Exsaviour (2016)**

The Responsiveness Of Civic Education Teacher Training Curriculum Towards Democratic Citizenship In Zambia .A Dissertation submitted to the School of Education, University of Zambia in partial fulfilment of the requirements for a Masters of Education in Civic Education UNIVERSITY OF ZAMBIA 2016

Dosen perguruan tinggi dan mahasiswa memiliki pemahaman yang minim tentang konsep kewarganegaraan. Banyak sekali Tantangan yang menghambat pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif, justru Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang tidak membekali nilai nilai demokratis mahasiswa dalam pengambilan keputusan. Minimnya pemahaman Dosen dan Mahasiswa dalam konsep kewarganegaraan, juga kurikulum Kewarganegaraan yang belum memenuhi harapan terceptanya peserta didik yang demokratis partisipatif. Perlunya penggunaan pendekatan

pedagogis partisipasi didalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka mengupayakan cita cita kewarganegaraan.

5. **Gonzal O Jover (2012)**

Education Of Citizens in And Out Of School, M. Print dan D. Lange (Eds.), Schools, Curriculum and Citizenship Education Building Democratic Citizens, 41–56. © 2012. Kata kunci Kewarganegaraan, Multikulturalisme, demokrasi dan Bangsa/nation. Metode Deskriptif Kualitatif.

Sekolah/Perguruan Tinggi harus menjadi tempat untuk mempromosikan budaya kewarganegaraan yang global dan menampung aspirasi dalam permintaan luas dalam sistem pendidikan saat ini. Langkahnya dengan mengambil dimensi baru dalam konteks kemasyarakatan dan politik aspirasi yang muncul di akhir abad ke-20: multikulturalisme, hak minoritas, kesetaraan gender, pengakuan mereka yang dikucilkan. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mendorong tumbuhnya keseimbangan antara Hak dan kewajiban warga Negara, dan pada sisi lain tumbuhnya pengakuan atas hak hak minoritas, kestaraan gender. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mendorong tumbuhnya keseimbangan antara Hak dan kewajiban warga Negara, dan pada sisi lain tumbuhnya pengakuan atas hak hak minoritas, kesetaraan gender. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam mempersiapkan warga Negara muda agar mampu berperan aktif dalam potitik dan masyarakat.

6. **Maria Olson (2012)**

What counts as young people's civic engagement in times of accountability?: On the importance of maintaining openness about young people's civic engagement in education Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Teaching and Learning in the Humanities (CeHum). University College of Skövde, Sweden. ORCID iD: 0000-0003-1776-478X 2012 (English).

Dalam artikel ini dikemukakan bahwa meskipun penilaian studi tersebut menangkap aspek-aspek penting dari keterlibatan sipil kaum muda, ketergantungan pendidikan yang terlalu kuat pada hal itu dapat berkontribusi pada kelangkaan dalam tugas pendidikan untuk melihat pada warga negara yang terlibat. keterlibatan sipil kaum muda, disarankan bahwa untuk melihat cara-cara yang bermanfaat dalam mendekati tugas pendidikan dalam

menyediakan keterlibatan sipil kaum muda, perlu menjaga keterbukaan terhadap gambaran yang berbeda tentang keterlibatan sipil. Diantaranya adalah hal-hal yang penting bagi kaum muda itu sendiri dalam dan melalui praktik sosial dan material yang mereka ikuti Partisipasi dan keterlibatan masyarakat, terutama warga Negara muda menjadi hal yang sangat fundamental dalam pembangunan demokrasi. Untuk mencapai hal tersebut Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam mempersiapkan warga Negara muda dalam partisipasi dan keterlibatannya dalam masyarakat bangsa dan Negara.

Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam mempersiapkan warga Negara muda dalam partisipasi dan keterlibatannya dalam masyarakat bangsa dan Negara. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat, terutama warga Negara muda menjadi hal yang sangat fundamental dalam pembangunan demokrasi.

7. **Avril Keating Debora (2009)**

Hinderliter Ortloff & Stavroula Philippou. *Citizenship education curricula: the Changes and Challenges Presented By Global And European Integration*. Pages 145-158 | Published online: 20 Mar 2009.

Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana negara-bangsa telah menanggapi tantangan ini dengan mengeksplorasi, dari perspektif komparatif, cara-cara di mana satu kewarganegaraan supra-nasional, regional (yaitu kewarganegaraan Eropa) telah didefinisikan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. (negara bagian dari seluruh Eropa). Kurikulum menjadi point penting untuk dipersiapkan dalam pendidikan di sekolah maupun di Perguruan Tinggi. Dengan adanya kurikulum tersebut, Konsep pendidikan seperti apa yang diinginkan dalam Pendidikan kewarganegaraan dan menghadapi tantangan tantangan masa depan yang semakin dinamis. Pendidikan kewarganegaraan telah terikat erat dengan legitimasi negara-bangsa, dan lembaga alternatif serta kewarganegaraan menghadirkan tantangan yang signifikan tidak hanya untuk isi kurikulum nasional, tetapi juga untuk tujuan tradisional dan asumsi pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum menjadi point penting untuk dipersiapkan dalam pendidikan di sekolah maupun di Perguruan Tinggi. Dengan adanya kurikulum tersebut, Konsep pendidikan

seperti apa yang diinginkan dalam Pendidikan kewarganegaraan dan menghadapi tantangan tangangan masa depan yang semakin dinamis.

8. **Isin, F. E. and B. S. Turner, (2002)** ‘Citizenship Studies’ pp. 1-9 in Isin, F. E. and B. S. Turner (eds.) *Handbook of Citizenship*. London: SAGE Publication.

Perlunya menata kembali konsep, mengkontruksi, dan merevisi kembali konsep Pendidikan kewrganegaraan. Karena banyaknya tantangan yang dihadapi. Studi kewarganegaraan haruslah sebuah studi interdisipliner yang tegas. Tidak ada keraguan bahwa kewarganegaraan juga muncul sebagai kebijakan yang menghubungkan tema utama (domain) yang berkisar dari kesejahteraan, pendidikan, dan pasar tenaga kerja ke hubungan internasional dan migrasi. Kewarganegaraan menghubungkan ini semua karena ia membawa ketiga permasalahan tersebut ke dalam orbit masalah mendasar. Studi kewarganegaraan merupakan suatu konsep yang mengandung analitis dan teoritis, sebagai alat untuk mengatasi ketidakadilan ini dengan kedalaman, kepekaan, ruang lingkup dan komitmen, sehingga diharapkan dengan konsep pemikiran tersebut muncul pendidikan dan perkembangan kewarganegaraan tersebut sebuah konsepsi baru kewarganegaraan yang lebih baik.

9. **William A. Galston (2001)**

Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education Annual Review of Political Science Vol. 4:217-234 (Volume publication date June 2001). <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.217> School of Public Affairs, University of Maryland, College Park, Maryland 20742; e-mail: wg14@umail.umd.edu

Pemahaman tentang Kewarganegaraan di Amerika Serikat berdasarkan Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan politik mempengaruhi penerimaan prinsip-prinsip demokrasi, sikap terhadap masalah tertentu, dan partisipasi politik. Terdapat bukti bahwa partisipasi politik sebagian merupakan barang posisional dan dibentuk oleh tingkat pencapaian pendidikan relatif maupun absolut. Bertentangan dengan temuan dari 30 tahun lalu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis kelas tradisional dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan

politik. Pembelajaran layanan kombinasi dari pengalaman sipil berbasis komunitas dan refleksi kelas sistematis pada pengalaman itu adalah inovasi yang menjanjikan, tetapi evaluasi program telah membuahkan hasil yang beragam. Perlu pendalaman mengapa partisipasi warga AS cenderung menurun, hal ini terkait dengan konsep pemahaman pendidikan kewarganegaraan yang rendah. Pendidikan kewarganegaraan kembali menjadi agenda ilmu politik di Amerika Serikat. Meskipun ada peningkatan besar dalam pencapaian pendidikan formal penduduk AS selama 50 tahun terakhir, tingkat pengetahuan politik hampir tidak bergerak. Maka perlu sekali adanya inovasi pada konsep pendidikan kewarganegaraan.

10. **IRVINE, J (1993)**

The Croat Question. Partisan Politics in the Formation of the Yugoslav Socialist State, Boulder, CO: Westview Press KARAKASIDOU, A. 1993 'Politicising culture: negating ethnic identity in Greek Macedonia', *Journal of Modern Greek Studies*, vol. 11, pp. 1–28 National identity and the 'other' 611 Konsep Budaya Politik, identitas Pendidikan kewarganegaraan akan membantu untuk memperkuat dan mempertahankan suatu masyarakat sipil (civil society) di mana warga negara muda berpartisipasi sebagai warga negara untuk belajar keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas Bentuk ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan perlu dikonstruksi kembali. Pendidikan kewarganegaraan akan membantu untuk memperkuat dan mempertahankan suatu masyarakat sipil (civil society) di mana warga negara muda berpartisipasi sebagai warga negara untuk belajar keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas.

11. **Andreas Brunold (2015).**

Civic Education for Sustainable Development and its Consequences for German Civic Education Didactics and Curricula of Higher Education. University of Augsburg, Germany *Discourse and Communication for Sustainable Education*, vol. 6, pp. 30–49, 2015

Semua sektor, termasuk bisnis, industri, pemerintah, organisasi non-pemerintah organisasi masyarakat dan pendidikan tinggi, harus didorong untuk

melatih pemimpin mereka dalam isu-isu keberlanjutan seperti pengelolaan lingkungan, kebijakan kesetaraan, dan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja mereka dalam praktik yang berkelanjutan. Pengembangan dari program pelatihan khusus untuk memastikan bahwa semua sektor tenaga kerja memiliki: pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara berkelanjutan adalah komponen penting dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Institusi pendidikan tinggi seperti universitas ditakdirkan untuk memprakarsai keberlanjutan pembangunan, karena perubahan kesadaran individu mengasumsikan politik pemerintah dan lembaga pendidikan tertentu yang mampu mendorong perubahan ini. Kemungkinan yang layak untuk institusi pendidikan tinggi adalah untuk melatih orang-orang secara berkelanjutan. Kemampuan dan untuk melaksanakan program magister terkait multidisiplin dan kompetensi berkaitan dengan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kelompok sasaran utama master program mungkin guru, pekerja sosial serta administrasi dan pemerintahan pejabat yang mengisi posisi kunci dan multiplier dalam masyarakat. Dengan fokus pada ini kelompok sasaran yang dapat disumbangkan oleh program Master secara khusus untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat yang hampir tidak terdengar baik di negara industri dan negara berkembang. Dididik dalam konten dan metode yang sama, guru dan pekerja sosial dan pejabat administrasi harus memulai dan mengkonsolidasikan stabilitas dan kolaborasi terkoordinasi dalam proyek dan konten yang sama. Tindakan umum ini harus memperkuat kohesi sosial di komunitas sekolah.

12. Uehara Naoto (2021)

The Formation of the Concept of the "Citizen" in Modern Japan and Development of Civic Education. Journal of the Research on Lifelong Learning and Career Education Journal of the Research on Lifelong Learning and Career Education (17), 16-33, 2021-03-31 Center for Research on Lifelong Learning and Career Education Graduate School of Education and Human Development, Nagoya Universiti.

Perdebatan seputar pendidikan kewarganegaraan berkembang di setiap negara. Dalam studi ini, untuk mengembangkan kerangka perdebatan yang sadar akan konteks sejarah Jepang, fokus ditempatkan pada sejarah pendidikan kewarganegaraan yang dipromosikan dalam proses pendirian negara-bangsa di Jepang modern dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, terutama struktur ideologis dari konsep “warga negara”. Dalam penelitian sebelumnya, sumbu analisis konsep warga negara telah ditetapkan dari dua konsep, “warga negara sebagai rakyat kaisar” dan “warga negara di bawah konstitusi modern”. Dalam studi ini, selain kedua konsep tersebut, ditambahkan pula konsep “warga negara yang memajukan otonomi masyarakat lokal”, berdasarkan pada karakteristik unik negara-bangsa Jepang di mana masyarakat lokal menjadi penengah antara individu dan bangsa. Dua konsep "warga negara sebagai rakyat kaisar" dan "warga negara di bawah konstitusi modern" dibentuk dengan munculnya sistem sekolah pada akhir abad ke-19. Konsep "warga yang memajukan otonomi komunitas lokal" terbentuk selama Gerakan Perbaikan Lokal (Chih? Kairy? Und?) pada awal abad ke-20. Kemudian, tiga konsep yang saling terkait satu sama lain, menyebabkan penyebaran pendidikan kewarganegaraan secara penuh sejak tahun 1920-an.

13. Kazuko Otsu (2002)

Civic Education Reform in Japan: Issues Facing a Society in Transition.
 Source: Pacific-Asian Education Journal. 2002, Vol. 14 Issue 1, p38-47. 10p.
 Artikel ini memberikan gambaran singkat tentang organisasi persekolahan, sejarah pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan kewarganegaraan di Jepang. Dilaporkan adalah hasil survei yang dilakukan di tiga sekolah di Kota Sapporo, Prefektur Hokkaido: sekolah negeri, swasta, dan universitas. Sementara kurikulum di tiga sekolah didasarkan pada pendekatan terpusat untuk pengambilan keputusan pendidikan di Jepang, masing-masing sekolah memiliki kebijakan dan perspektifnya sendiri terkait dengan sifat dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di ketiga sekolah tersebut, para siswa tidak memiliki kesempatan untuk belajar tentang esensi atau semangat demokrasi sebagai proses atau konsep politik. Makalah ini menyimpulkan bahwa kepala sekolah, guru dan siswa melihat warga negara

yang baik dan orang baik sebagai sinonim dan mendefinisikan mereka tidak dalam hal hubungan antara individu swasta dan masyarakat publik yang lebih besar, melainkan dalam hal hubungan antara individu swasta.

14. **Ping Xiao (2020)**

School of Public Administration, Southwest Jiaotong University 111, 2nd Ring Road North, Chengdu 610031, China Tel: 86-28-8760-3848 E-mail: pxiao008@gmail.com Huasheng Tong, School of Political Science, Southwest Jiaotong University 111, 2nd Ring Road North, Chengdu 610031, China Tel: 86-28-8760-0818 E-mail: tonghuasheng@126.com Aims and Methods of Civic Education in Today's Universities of China

Pendidikan kewarganegaraan, sebagai cara untuk menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan dan tanggung jawab kewarganegaraan dan untuk membentuk warga negara yang baik, harus meresapi seluruh proses sosialisasi seseorang. Pada berbagai tahap pendidikan kewarganegaraan, harus sesuai tujuan pendidikan, isi dan metode yang konsisten dengan karakteristik yang berbeda tahapan. Untuk alasan sejarah dan budaya, universitas Cina sekarang harus menyelesaikan bagian yang belum selesai dari konten pendidikan kewarganegaraan yang belum dibahas di sekolah menengah. Perguruan tinggi harus, atas dasar pengetahuan dan keterampilan profesional, memiliki pendidikan kewarganegaraan yang terkait dengan peraturan kerja dan profesional; etika dalam profesi tertentu. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk secara mandiri menilai nilai dan mengontrol perilaku mereka dengan benar dan untuk mencapai tujuan, sistem konten harus dirancang dengan baik dan metode pengajaran juga harus digunakan dengan benar. mengenal dan menganalisis esensi “pendidikan kewarganegaraan” dan membandingkan pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan moral tradisional, kami mengajukan sudut pandang berikut: Berbagai tingkat nasional pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan kewarganegaraan yang berbeda menyesuaikan dengan kondisi siswa dari tingkat yang berbeda; tugas pendidikan kewarganegaraan di universitas, yang pada dasarnya berbeda dari sekolah dasar dan sekolah menengah, adalah untuk membangun kepribadian

subyektif warga negara, yang berfokus pada kemampuan penilaian siswa tentang hak dan salah dan kontrol perilaku mereka; harus menebus konten yang hilang tentang nilai-nilai profesional dan kriteria pekerjaan untuk mengakomodasi siswa ke masyarakat berbasis keterampilan yang sangat khusus. Dalam makalah kami juga mempertanyakan masalah metodologis saat ini dan kemudian mengajukan beberapa metode pengajaran yang mengadaptasi untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan.

15. Vanessa Ruge (2006)

The renewal of civic education in France and in America: Comparative perspectives. International and Comparative Politics Department, American University – Central Asia, 205 Abdumomunov Street, Bishkek 720040, Kyrgyzstan Available online 19 January 2006.

Artikel ini melakukan studi banding tentang pembaruan pendidikan kewarganegaraan baik di Prancis maupun di Amerika. Ini menyatakan bahwa meningkatnya kekhawatiran tentang subjek berbicara tentang minat yang lebih luas untuk masalah sipil dan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya secara implisit dihadirkan sebagai solusi kunci bagi sikap apatis politik dan keterlepasan kaum muda serta meningkatnya jumlah ketidaksopanan dan tindakan kekerasan di sekolah. Artikel pertama menunjukkan bahwa pengajaran kewarganegaraan jelas tetap tidak memuaskan di kedua negara. Kemudian meninjau argumen utama yang disajikan oleh mereka yang menyerukan pembaruan lapangan. Akhirnya, menjelaskan mengapa semua harapan ini terlalu tinggi dan menyimpulkan bahwa sekolah tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya arena sosialisasi politik.

16. Rennie J Moon (2021)

Negotiating human rights: citizenship education in South Korea Asia Pacific Journal of Education vol. 41 2021

Studi ini menyelidiki bagaimana pendidikan hak asasi manusia (HRE), sebuah gerakan global dan model pendidikan kewarganegaraan berdasarkan kepribadian universal daripada kebangsaan, disajikan dan dinegosiasikan dalam kaitannya dengan wacana kewarganegaraan nasional dalam pendidikan

moral sekolah menengah dan buku pelajaran IPS Korea Selatan. mengidentifikasi empat pendekatan berulang yang secara konsisten digunakan dalam buku teks untuk mendidik siswa tentang hak asasi manusia: (1) membedakan antara hak asasi manusia universal dan hak konstitusional nasional, (2) menekankan kewajiban kepada masyarakat nasional, (3) mengakomodasi identitas global dan nasional melalui wacana pencapaian harmoni dan (4) menunjukkan kesinambungan antara nilai-nilai moral universal dan nasional. Temuan ini berkontribusi pada literatur empiris yang ada tentang pendidikan kewarganegaraan Korea dengan menyelidiki interaksi narasi kewarganegaraan global dan lokal

17. Hye Seung Cho (2016)

The Gaps between Values and Practices of Global Citizenship Education: A Critical Analysis of Global Citizenship Education in South Korea" (2016). Doctoral Dissertations. 736.

Studi ini mengkaji bagaimana Global Citizenship Education (GCE) dipersepsikan dan diimplementasikan di Korea Selatan. GCE telah menerima banyak perhatian di seluruh dunia di kalangan pendidik, pembuat kebijakan, dan organisasi, sebagaimana tercermin oleh Global Education First Initiative (GEFI), agenda pendidikan Pasca-2015, dan The Sustainable Development Goals (SDGs). Sejalan dengan tren global ini, World Education Forum yang diadakan di Korea Selatan juga memfasilitasi minat dan diskusi tentang GCE di Korea Selatan. Dalam konteks minat yang meningkat pada GCE baik di masyarakat global maupun Korea Selatan, disertasi saya mengeksplorasi fitur inti GCE di Korea Selatan yang berfokus pada alasan, isi, dan implementasi dari perspektif kritis.

Analisis dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsep pendekatan kritis GCE (Andreotti, 2006; Davies, 2006; Shultz, 2007) beserta teori-teori sosial kritis dengan penekanan khusus pada teori hegemoni, reproduksi budaya, dan teori ras kritis. . Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan mengandalkan analisis dokumen dan serangkaian wawancara. Saya menganalisis lima buku panduan guru untuk promosi GCE yang dikembangkan oleh organisasi terkait pemerintah. Wawancara dilakukan dengan dua puluh

pemangku kepentingan pendidikan yang bertanggung jawab atas GCE termasuk seorang pejabat pemerintah, tiga staf organisasi internasional, delapan pekerja LSM, dan delapan guru.

Melalui analisis kritis GCE di Korea Selatan, penelitian ini menawarkan pemahaman rinci tentang bagaimana ideologi yang berbeda mengenai GCE ada secara kompleks dalam konteks Korea dengan memperluas literatur yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa terlepas dari kemungkinan GCE berfungsi sebagai kekuatan kontrahegemoni, nilai-nilai dan kurikulum GCE di Korea Selatan juga mereproduksi cita-cita hegemonik neoliberalisme, pandangan dikotomi status ekonomi, dan pandangan biner tentang hubungan inti-pinggiran. Studi ini juga menggambarkan pengekangan konseptual dan struktural yang memperkuat ide-ide hegemonik GCE. Berdasarkan temuan, saya berpendapat GCE harus ditangani dan diimplementasikan dengan hati-hati mengingat landasan dan aspek ideologisnya yang berbeda yang berpotensi memperkuat ide-ide hegemonik. Tanpa mempertimbangkan fitur-fitur tersebut, GCE mungkin dimaksudkan dengan baik tetapi pada kenyataannya gagal membuka kemungkinan untuk mengubah praktik diskursif menuju nilai-nilai keadilan sosial.

18. Wolfgang Althof, Marvin W. Berkowitz (2006)

Moral education and character education: their relationship and roles in citizenship education. Journal Of Moral education, vol.35, 2006.

Setiap masyarakat demokratis harus memperhatikan sosialisasi warganya. Ini dimulai pada masa kanak-kanak, dan sekolah sangat penting untuk proses ini. Keterkaitan dan peran mendidik karakter (pendidikan karakter, pendidikan moral) dan pendidikan kewarganegaraan (pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan) dieksplorasi, sebagian besar dalam konteks Amerika Utara. Dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan tentu memerlukan pembentukan karakter dan moral, tetapi integrasi ini terhalang oleh stereotip negatif antara dua bidang. Selain itu, stereotip negatif antara bidang pendidikan moral dan pendidikan karakter semakin memperumit upaya sintesis. Melalui eksplorasi masing-masing domain dan persamaan dan perbedaannya, disimpulkan bahwa peran sekolah dalam membina

pengembangan warga negara yang bermoral dalam masyarakat demokratis memerlukan fokus pada pengembangan moral, pengembangan moral dan karakter terkait yang lebih luas, pengajaran kewarganegaraan dan pengembangan moral. keterampilan dan disposisi kewarganegaraan. Selain itu, hasil ini tumpang tindih dan melintasi bidang pendidikan moral, karakter, dan kewarganegaraan.

19. Steven P. Camicia and Juanjuan Zhu (2011)

Citizenship Education under Discourses of Nationalism, Globalization, and Cosmopolitanism: Illustrations from China and the United States In: Frontiers of Education in China Online Publication Date: 01 Jan 2011.

Satu dari Cina dan satu dari Amerika Serikat, menyajikan kerangka teoritis untuk memahami bidang diskursif pendidikan kewarganegaraan yang sebagian besar terdiri dari wacana nasionalisme, era global, dan kosmopolitanisme. Kerangka tersebut diilustrasikan dengan contoh-contoh dari pendidikan kewarganegaraan di Cina dan Amerika Serikat. Pendidikan kewarganegaraan dalam contoh ini banyak dipengaruhi oleh wacana nasionalisme. Bidang-bidang diskursif itu terpecah-pecah, spesifik-konteks, dan dinamis. Sebagai kesimpulan, penulis menyerukan kesadaran tentang bagaimana wacana ini beroperasi, dan mengusulkan agar wacana era global dan kosmopolitanisme bergabung dan memperkuat dalam pendidikan kewarganegaraan. Efeknya bisa berupa pendidikan kewarganegaraan baru yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat demokratis lokal dan global saat ini.

20. Laila Kadiwal, Manish Jain (2020)

Civics and Citizenship Education in India and Pakistan Handbook of Education Systems in South Asia, Editors (view affiliations), Padma M. Sarangapani Rekha Pappu, 18 Mei 2020

Gagasan warga negara dan disiplin sekolah kewarganegaraan, yang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menciptakan warga negara yang ideal, memiliki jejak kolonial. Kewarganegaraan dan kewarganegaraan telah melintasi sejarah pascakolonial pembangunan bangsa, pembentukan negara, modernitas, dan demokrasi/otoritarianisme di negara-bangsa Asia Selatan, India dan Pakistan. Dalam konteks era global, gagasan warga negara juga

ditandai dengan wacana kewarganegaraan global, gerakan berbasis identitas, dan penegasan kembali nasionalisme. Bab ini menempatkan kewarganegaraan dalam konteks sejarah dan transisi ini. Menggambar pada penelitian yang ada, itu juga menganalisis kontestasi atas inklusi dan pengecualian dari kewarganegaraan seperti yang diwakili dalam mata pelajaran sekolah kewarganegaraan, studi sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Praktik pedagogik dominan dari subjek dan alternatifnya, bersama dengan diskusi tentang kesenjangan dalam penelitian yang ada dan bidang studi berita potensial, disorot.

21. Carles Boix and Susan C. Stokes (2009)

National Identity Liah Greenfeld and Jonathan Eastwood The Oxford Handbook of Comparative Politics Print Publication Date: Jul 2009 Subject: Political Science, Comparative Politics, Political Behavior Online Publication Date: Sep 2009 DOI:10.1093/oxfordhb/9780199566020.003.0011.

Artikel ini melihat kajian tentang identitas nasional, yang harus dimulai dengan penyelidikan awal tentang masalah identitas. Ini memberikan definisi identitas nasional dan nasionalisme sebelum beralih ke penjelasan sejarah kebangkitan nasionalisme. Ini juga mengidentifikasi jenis nasionalisme dan implikasi politiknya.

22. Jeffrey T. Checkel (1999)

Norms, Institutions, and National Identity in Contemporary Europe ARENA, University of Oslo, *International Studies Quarterly* (1999) 43, 83–114.

Artikel ini, dengan mengeksplorasi peran pembelajaran sosial dan kognitif mikro-founda-di tingkat pengambil norma, membantu memulihkan lembaga ke tempat yang seharusnya diperusahaan konstruktivis. Dengan demikian, itu akan membantu para sarjana ini dalam mengembangkan sebuah teori aksi dan sosialisasi konstruktivis yang khas, sementara juga membantu membatasi lebih jelas klaim mereka vis-à-vis pesaing teoretis.

23. M. Lane Bruner (2006)

Rhetorical Theory and the Critique of National Identity Construction Pages 309-327 *National Identities* Volume 7, 2005 | Published online: 19 Aug 2006.

Sebuah fitur mencolok dari beasiswa tentang identitas nasional adalah relatif tidak adanya teori retorika, atau teori yang berkaitan dengan dimensi persuasif wacana, terutama mengingat fakta bahwa ahli teori retorika telah prihatin dengan pembuatan opini publik dan identitas kolektif selama lebih dari dua milenium.

Dari berbagai temuan penelitian terdahulu, diketahui bahwa Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Memperkuat Identitas Nasional Perspektif Global. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan dasar bahwa dari semua penelitian relevan yang peneliti temukan tidak membahas tentang pentingnya sebuah rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat identitas nasional perspektif global.

2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses berkelanjutan, yang ditujukan kepada warga muda, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, intelektual, dan moral, sebagai proses mendorong kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, sehingga warga negara muda dapat berperan aktif secara sosial politik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu untuk merekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan, rekonstruksi harus dilakukan karena Pendidikan kewarganegaraan merupakan cabang ilmu yang multi disiplin.

Rekonstruksi harus betul betul dijalankan dengan baik, didukung oleh semua komponen masyarakat dan regulasi pemerintah yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Rekonstruksi yang pertama adalah harus mengedepankan rekonseptualisasi Pendidikan kewarganegaraan dengan penguatan tiga domain utama Pendidikan Kewarganegaraan yaitu *civic knowledge*, penguatan *civic skills*, penguatan *civic virtue*. Rekontruksi kedua adalah dengan mereposisi Pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler, membentuk Gerakan sosio-kultural kewarganegaraan. Rekonstruksi ketiga adalah dengan melakukan inovasi kurikulum, inovasi kurikulum agar menghasilkan kurikulum yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mampu menjawab tantangan bangsa menjadi bangsa yang beradab. Inovasi kurikulum juga dengan mendesain model model pembelajaran yang inovatif, kreatif.

Muhamad Subkhan, 2025

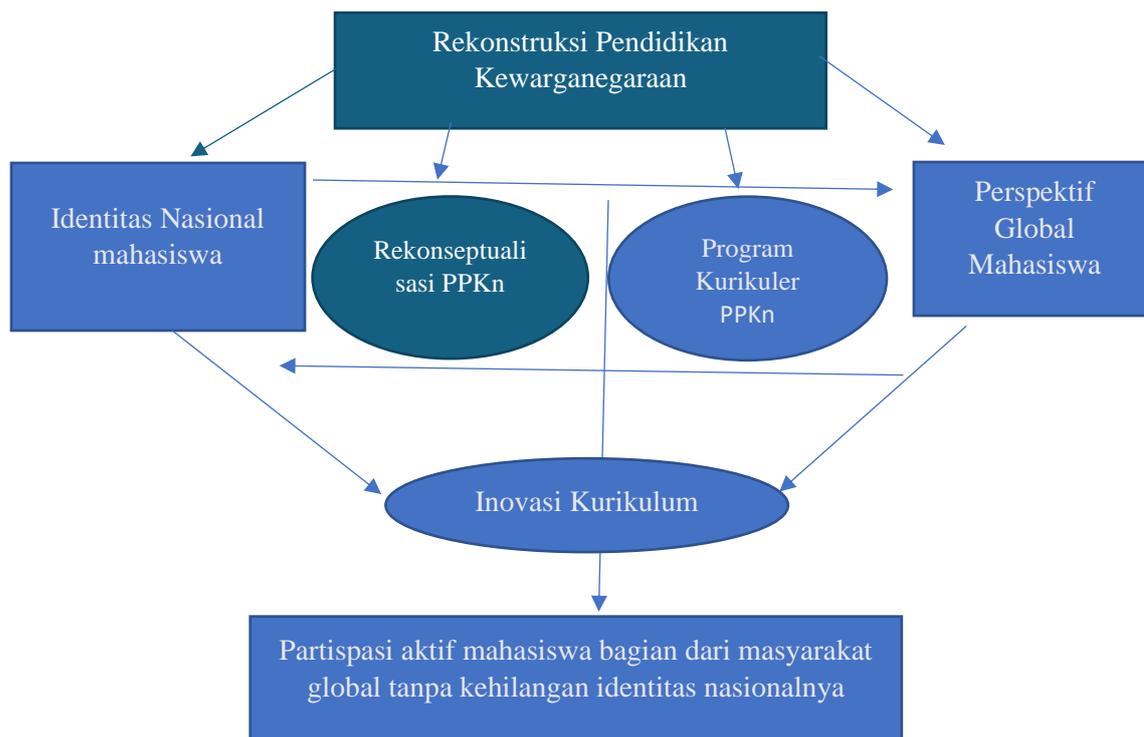
REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL
PERSPEKTIF GLOBAL (STUDI DESKRIPTIF DI UPI, UNJ, dan UNNES)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dengan proses pendidikan kewarganegaraan yang berlanjut, tentunya diharapkan ada pengaruhnya pada Identitas Nasional. Identitas nasional sebuah bangsa dalam pembentukannya tidak hanya berdasarkan kesamaan etnis, bahasa dan sejarahnya saja, akan tetapi identitas nasional dapat dikonstruksi dan dikembangkan dengan menambahkan pada aspek sosio psikologis yakni persamaan keyakinan dan tujuan yang nantinya menjadi ciri khas sebuah bangsa, yang ciri khas atau identitasnya tersebut dapat membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya.

Dengan pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan akan berpengaruh juga terhadap Identitas Nasional dalam ruang lingkup ke-Indonesiaan. Identitas Nasional Bangsa Indonesia adalah Ideologi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Identitas lainnya adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang menunjukkan kearifan Lokal bangsa Indonesia yang membedakan identitas tersebut dengan bangsa lain di dunia.

Terkait dengan perspektif global Warga negara tidak bisa mengisolasi diri dan harus memiliki wawasan global di era disrupsi yang terus bergerak begitu cepat dan massif, oleh karena itu pembentukan dan penguatan warga negara yang berwawasan global (*global citizen*) mutlak diperlukan. Pendidikan global (*global education*) melalui Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan untuk membekali warga negara dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan global tersebut. Tiga kompetensi utama wawasan global warga negara, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan watak kewargaan diperlukan dalam rangka menghadapi dan menjalani era digital. Gagasan tersebut dapat memperkuat ilmu pengetahuan sosial termasuk di dalamnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk lebih berorientasi kepada pendidikan berwawasan global, dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warga dunia (*global citizen*) yang memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat bangsa, dan anggotan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk memperkuat identitas nasional dalam perspektif global mahasiswa.

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2023)

Kerangka berpikir penelitian rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan memperkuat identitas nasional perspektif global mahasiswa dapat dipaparkan bahwa:

1. Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi keniscayaan, sebagai bagian dari ilmu yang multi disiplin untuk mewujudkan tujuan dari Pendidikan kewarganegaraan.
2. Rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan akan menjadi stimulus dalam meningkatkan identitas nasional mahasiswa yang dalam konteks ke-Indonesiaan identitas nasional semakin memudar.
3. Dunia yang global sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dicegah, terutama teknologi informasi. Dengan rekonstruksi Pendidikan kewarganegaraan, dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikelola dengan kecerdasan intelektual mahasiswa. Pada sisi lain dengan rekonstruksi

Pendidikan kewarganegaraan dampak positif mendorong mahasiswa memiliki perspektif global.

4. Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan mendorong mahasiswa sebagai warga negara muda memiliki perspektif global sebagai bagian dari warga global, namun demikian ada kesadaran dari warga negara muda (Mahasiswa) untuk menjaga dan memelihara identitas nasionalnya.